



IIS MONOGRAPH SERIES #5

Damai Pangkal Damai

Berpacu Dengan Waktu

Refleksi Perlawanan Nirkekerasan
di Indonesia dan Dunia 2023

2808-5221



Damai Pangkal Damai: **Berpacu Dengan Waktu**

Refleksi Perlawanan Nirkekerasan di Indonesia dan Dunia 2023

Penulis:

Diah Kusumaningrum
Dhanisa Salsha Handiani
Daniel Petz
Kai Peter Stabell

Editor:

Diah Kusumaningrum

Peneliti dan Enumerator Pangkalan Data:

Ayu Diasti Rahmawati, Daniel Petz, Diah Kusumaningrum, Novi Kurnia, Aditya Wibowo, Ainur Rohmah, Caecilia Galih Krisnhamurti, Coory Yohana Pakpahan, Dhanisa Salsha Handiani, Husna Yuni Wulansari, Ilham Dary, Inas Mufidatul Insiroh, Imas Indra Hapsari, Ganesh Cintika Putri, Grace Lolona, Kanaya Ratu Aprillia, Ken Ayu Galuh Satiti, Melinda Gularso, Mira Ardhya Paramastri, Nandita Putri, Naomi Resti Anditya, Nabila Auliani Ruray, Sartika Pradhani, Selma Theofany, Taradhinta Suryandari, Verena Widanti, Wahyuwidi Cinthya, Yuda Rashadian

Tata Letak:

M. Furqon

Ilustrator:

Narinda Marsha Paramastuti, M. Furqon

Manajemen:

Ganesh Cintika Putri (2016-2017), Caecilia Galih Krisnhamurti, Taradhinta Suryandari, Angganararas Indriyosanti (2018), Coory Yohana Pakpahan (2019), Sri Handayani Nasution, Dhanisa Salsha Handiani, Kanaya Ratu Aprillia (2020), Alifa Ardhya (2021), Dhanisa Salsha Handiani, Kanaya Ratu Aprillia (2022), Dhanisa Salsha Handiani (2023)

© Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

ISSN 2808-5221

Diterbitkan oleh:
Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada

Alamat Penerbit:
Jl. Sosio Yustisia 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
iis.fisipol@ugm.ac.id

Terima kasih kepada:

alm. Samsu Rizal Panggabean, Aghniadi, Arie Rostika Utami, Chaiwat Satha-Anand, Christopher Shay, Erica Chenoweth, Ihsan Ali-Fauzi, Jacky Manuputty, Jamila Raqib, Janjira Sombatpoonsiri, Joned Suryatmoko, Luqman-nul Hakim, Maulida Raviola, Michael Beer, Nabilah Nur Abiyanti, Nisrina Nadhifah Rahman, Puri Kencana Putri, Sana Jaffrey, Treviliana Eka Putri, Veronique Dudouet, and Zainal Abidin Bagir.

Damai Pangkal Damai (DPD) adalah proyek pangkalan data pertama yang mengkhususkan diri pada aksi nirkekerasan di Indonesia era Reformasi. Diinisiasi pada tahun 2016, DPD bernaung di Institute of International Studies (IIS), sayap riset dan advokasi Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.

Pangkalan data DPD mencatat aksi-aksi nirkekerasan yang terjadi di Indonesia mulai 1999 hingga saat ini. Secara berkala, DPD meluncurkan siniar yang menampilkan para PNS – Pekerja Nirkekerasan Sehari-hari. DPD juga menerbitkan infografis mingguan, kaleidoskop bulanan, dan refleksi tahunan mengenai perlawanan nirkekerasan di Indonesia dan dunia.

Refleksi tahunan yang mulai terbit sejak 2021 ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkomitmen memperkuat demokrasi. DPD percaya bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya diperjuangkan dengan memperkuat struktur demokrasi (pemisahan eksekutif-legislatif-yudikatif, pers yang bebas, pemilu yang *luber* dan *jurdil*, dan lainnya) tetapi juga dengan memperkuat kultur demokrasi – termasuk di dalamnya preferensi dan keterampilan aktor masyarakat sipil dan negara dalam berkontestasi secara nirkekerasan.



Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif: Berpacu Dengan Waktu	1
Tim Damai Pangkal Damai	
Indonesia 2023: Bergerak Sebelum Terlambat	5
Diah Kusumaningrum	
Perjalanan Gerakan Maksimalis 2023: Yang Berlanjut, Yang Bangkit, dan Yang Berjaya	13
Dhania Salsha Handiani	
Arah Langkah Eskalasi Perjuangan Keadilan Iklim.....	25
Daniel Petz	
Babak Baru Perlawanan Nirkekerasan Palestina.....	37
Kai Peter Stabell	
198 Metode Aksi Nirkekerasan	50
Riwayat Singkat Penulis	54
Produk DPD.....	55

Ringkasan Eksekutif: Berpacu Dengan Waktu

Tim Damai Pangkal Damai

Apa yang dapat dibanggakan dari tahun 2023? Otokratisasi semakin menjadi, invasi Rusia di Ukraina belum berakhir, pendudukan Israel di Palestina memasuki babak baru pembantaian warga sipil, krisis iklim semakin tidak tertangani, kelompok sayap kanan muncul di berbagai penjuru dunia – sulit rasanya melangkah masuk ke tahun 2024 dengan ringan dan optimis. Padahal di tahun 2024 ini, lebih dari separuh warga dunia – termasuk kita di Indonesia – berhadapan dengan pemilihan umum di negara masing-masing. Jika tidak waspada dan dilawan balik, proses yang seharusnya menjadi pesta demokrasi malah berpeluang menjadi pelembagaan otokratisasi. Siapa saja yang selama ini melawan balik menggunakan strategi nir-kekerasan? Apa capaian mereka di tahun 2023?

Damai Pangkal Damai (DPD) merujuk pada Thomas Weber dan Robert Burrowes yang mendefinisikan “aksi nirkekerasan” sebagai “istilah payung bagi aneka metode berkonflik yang kesemuanya didasarkan pada prinsip tidak menggunakan kekerasan fisik, setidaknya terhadap orang lain.” Padanannya dalam bahasa Inggris antara lain adalah *nonviolence*, *nonviolent action*, *direct action*, *active nonviolence*, *nonviolent resistance*, dan *civil resistance*.

DPD juga merujuk pada Gene Sharp yang mengidentifikasi 198 metode aksi nirkekerasan dan membaginya ke dalam tiga kategori, yaitu (1) protes dan persuasi, (2) nonkooperasi, serta (3) intervensi.

Sumber:

Gene Sharp, *The Politics of Nonviolent Action. Part 2: The Methods of Nonviolent Action* (Bedford: Porter Sargent Publishing, 1973).

Thomas Weber and Robert J. Burrowes, “Nonviolence: An Introduction,” *Peace Dossier* 27, no 2 (February 1991).

Edisi keempat refleksi tahunan Damai Pangkal Damai (DPD) kembali menghadirkan empat segmen, masing-masing mengenai Indonesia, gerakan maksimalis, gerakan reformis, dan isu khusus. Segmen pertama mengulas perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023, yang tidak menunjukkan perkembangan berarti dari tahun-tahun sebelumnya. Segmen kedua memetakan gerakan-gerakan maksimalis yang muncul, meningkat intensitasnya, meredup, atau berubah menjadi gerakan reformis di sepanjang 2023. Segmen ketiga menyoroti eskalasi gerakan iklim global. Adapun segmen keempat mengelaborasi sejarah dan dinamika perlawanan nirkekerasan dalam perjuangan pembebasan Palestina. Kesemuanya menggarisbawahi pentingnya bergerak sekarang, sebelum terlambat -- sebelum otokrasi di Indonesia dan aneka negara lain lebih kuat terkonsolidasi, sebelum melampaui kenaikan suhu bumi 2 derajat Celcius, sebelum sebuah bangsa terhapus musnah.



Adu Jitu. Perlawanan nirkekerasan bukanlah sekadar ekspresi protes terhadap ketidakadilan sosial. Ia adalah adu jitu, di mana aktivis melancarkan metode nirkekerasan tertentu guna menimpakan *dilemma action* kepada lawan. Di sini, lawan dipaksa menghitung kembali ongkos moral, politik, sosial, dan ekonomi yang harus ditanggungnya jika meneruskan langkah atau kebijakannya. Keberhasilan beberapa perlawanan nirkekerasan tahun 2023 tampaknya didukung oleh daya kejutnya. Demonstrasi “yang berjalan seperti biasa” terbukti tidak efektif. Kombinasinya dengan metode lain, durasinya yang mencapai hitungan minggu atau bulan, keikutsertaan segmen masyarakat yang beragam, dukungan media, serta beberapa inovasi lain menjadi penentu apakah *dilemma action* bisa ditempatkan secara pas, dan karenanya menggerakkan *jiu-jitsu* moral dan/atau politik yang menjadi inti dari perlawanan nirkekerasan.



Konsolidasi Otokrasi. Menyusul gelombang otokratisasi global yang hampir dua dekade ini, tampaknya telah terjadi konsolidasi otokrasi di berbagai penjuru dunia. Di sini, pemilu, aturan hukum, dan institusi-institusi negara yang dulunya menjadi tumpuan demokrasi telah dibajak atau dikooptasi guna melembagakan represi. Di tengah infrastruktur represi yang semakin kuat, apa saja infrastruktur perlawanan yang perlu dibangun?



Masih stagnan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023 mengalami stagnasi. Jumlahnya tetap jauh di bawah rata-rata sepanjang Reformasi, repertoarnya tetap sempit, dan intensitasnya tetap rendah. Kabar baiknya, ada ratusan metode aksi nirkekerasan dari kategori “nonkooperasi” dan “intervensi,” serta banyak perlawanan nirkekerasan dari berbagai negara, terutama dari Global South, yang dapat dijadikan rujukan, baik dalam perjuangan pro-demokrasi, anti-perampasan tanah, keadilan gender, keadilan iklim, dan lainnya.



Gender dan Iklim. Isu-isu keadilan gender dan keadilan iklim tampak makin terarusutamakan dalam gerakan-gerakan lain di Indonesia tahun 2023, termasuk pro-demokrasi, ketenagakerjaan, dan anti-perampasan tanah. Ke depannya, lensa gender dan iklim sangat mungkin menjadi dasar terbentuknya gerakan sosial lintas-sektoral.



Maksimalis-Reformis. Literatur studi nirkekerasan masih mempelajari secara terpisah gerakan-gerakan nirkekerasan yang bersifat maksimalis (menuntut pergantian rezim) dan yang bersifat reformis (menuntut perbaikan aspek tertentu). Beberapa tahun terakhir, DPD menggarisbawahi betapa kedua jenis gerakan sangat berkaitan. Beberapa gerakan maksimalis, misalnya, bergeser menjadi reformis demi bertahan dari pukulan balik lawan atau sebagai adaptasi terhadap kemenangan mereka.



Hiatus. Sebuah gerakan maksimalis bisa jadi meredup. Ini tidak dapat dikatakan sebagai kegagalan. Hiatus, atau rehat, semacam ini terkadang dibutuhkan guna menghindari lebih banyak korban jiwa, menyusun strategi jangka panjang, maupun menyiapkan institusi-institusi alternatif.



Eskalasi Perlawanan Iklim. Membandingkan tiga periode gerakan keadilan iklim, DPD melihat eskalasi yang signifikan setelah pandemic Covid-19. Dari lima dimensi eskalasi yang ada, yang paling menonjol adalah eskalasi seputar metode dan provokasi, di mana gerakan-gerakan yang ada banyak mengandalkan “blockadia” dan disrupsi psikologis, yang pada titik tertentu, rentan dilabel sebagai sabotase. Tantangannya adalah memperkuat eskalasi seputar dilemma action, terutama dalam hal menimpakannya lebih kepada industri bahan bakar fosil dan negara, daripada ke sesama warga.



Konflik, Pendudukan, Genosida. Menelusuri sejarah perlawanan nirkekerasan di Palestina, DPD mencatat bagaimana aneka aksi yang dilakukan sejak Oktober 2023 telah menggeser bingkai dalam memandang persoalan Israel-Palestina, dari konflik, ke pendudukan, ke genosida. Meski belum banyak mengubah kondisi di lapangan, pergeseran bingkai ini menjadi infrastruktur penting dalam perjuangan pembebasan Palestina ke depannya.



Indonesia 2023: Bergerak Sebelum Terlambat

Diah Kusumaningrum

November 2023 menjadi saksi bagaimana ratusan ribu warga Indonesia dapat berkumpul di pusat ibukota guna bersolidaritas dengan warga Palestina. Apa yang perlu dilakukan supaya antusiasme yang sama mewarnai agenda-agenda keadilan sosial di Indonesia? Pertanyaan ini penting dijawab mengingat jumlah, ragam bentuk, dan intensitas perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023 tidak mengalami peningkatan berarti dari tahun-tahun sebelumnya.

Catatan reflektif ini menyajikan data dari Damai Pangkal Damai (DPD), diikuti dengan pembahasan mengenai tiga tema utama perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023. Di tengah otokratisasi yang semakin menjadi, serta pemilihan umum 2024 yang hasilnya berpotensi mengunci trayek otokratisasi tersebut, tulisan ini menggarisbawahi pentingnya bergerak sebelum terlambat.



Kotak 1

Protes dan persuasi meliputi aksi-aksi nirkekerasan di mana pelaku “sekadar” menunjukkan penolakan atau persetujuan. Termasuk di dalamnya adalah demonstrasi, *march*, pawai, petisi, poster, orasi, dan *happening art*.

Nonkooperasi meliputi aksi-aksi nirkekerasan di mana pelaku bukan sekadar menunjukkan penolakan, tetapi juga menarik partisipasinya dari praktik atau institusi yang dilawan. Termasuk di dalamnya adalah mogok, boikot, dan divestasi.

Intervensi meliputi aksi-aksi nirkekerasan di mana pelaku bukan sekadar menunjukkan penolakan dan menarik partisipasinya, melainkan berusaha mendisrupsi praktik atau institusi yang dilawannya itu. Termasuk di dalamnya adalah memblokir, menduduki, mengadang, dan sebagainya.

Sumber:

Gene Sharp, *The Politics of Nonviolent Action. Part 2: The Methods of Nonviolent Action* (Bedford: Porter Sargent Publishing, 1973).

2023 Dalam Angka

Pangkalan data utama DPD mencatat adanya 15.043 perlawanan nirkekerasan di Indonesia sepanjang 25 tahun Reformasi (1999-2023), 356 di antaranya terjadi di tahun 2023.¹ Mengingat aneka keterbatasan pengumpulan data, angka tersebut perlu dilihat sebagai estimasi bawah – artinya ada lebih banyak praktik perlawanan nirkekerasan daripada yang terekam di pangkalan data. Dipadukan dan diperiksa silang dengan data dengan dari berbagai kanal jurnalistik dan aneka laporan organisasi masyarakat sipil, pangkalan data DPD menunjukkan setidaknya tiga kecenderungan perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023: jumlahnya meningkat, repertoarnya tetap terbatas, intensitasnya tetap rendah.

Pertama, jumlah perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022, dari 219 ke 356. Ini merupakan titik balik, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah tersebut menurun dari 336 di tahun 2020, ke 271 di tahun 2021, hingga 219 di tahun 2022. Meski terjadi peningkatan di tahun 2023, jumlahnya masih jauh dari rata-rata jumlah perlawanan nirkekerasan per tahun sepanjang Reformasi, yaitu 601,72.

Kedua, repertoar metode aksi nirkekerasan yang digunakan di Indonesia sepanjang tahun 2023 tetaplah terbatas. Tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun

sebelumnya, perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023 hanya memanfaatkan 34 dari 198 metode yang tersedia. Seperti bisa ditebak, metode yang paling sering digunakan adalah demonstrasi atau unjuk rasa (metode #47), yang dipadukan dengan orasi (metode #1), penggunaan slogan dan tagar (metode #7), tampilan spanduk dan poster (metode #8), pertunjukan seni (metode #36), serta *march* (metode #38). Penggunaan “paket kombo” ini mencakup 59,26% dari keseluruhan perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023. Metode yang penggunaannya meningkat secara signifikan adalah mogok makan (metode #159), yang banyak digelar ketika mengupayakan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang berkeadilan.² Adapun metode yang penggunaannya tetap rendah di Indonesia meski meningkat di seluruh dunia adalah mogok kerja (metode #97-117).

¹ Lihat pangkalan data Damai Pangkal Damai, *di sini*.

² Sonya Hellen Sinombor, “Proses Legislasi Macet Lagi, PRT Akan Mogok Makan,” Kompas, 6 Agustus 2023.

Diagram 1

Jumlah aksi nirkekerasan di Indonesia era Reformasi

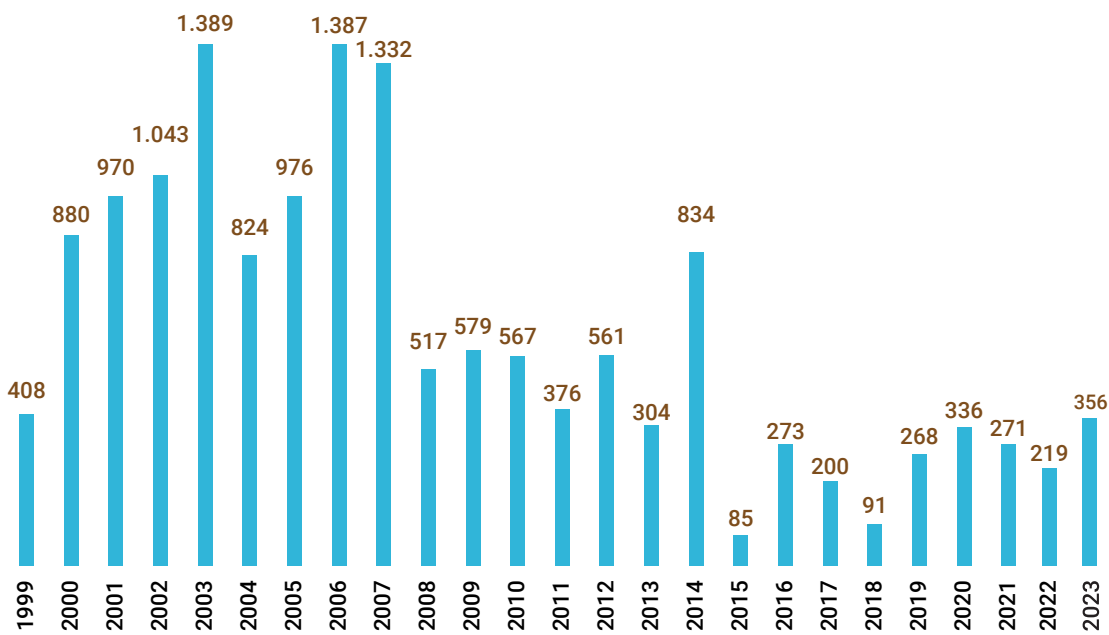
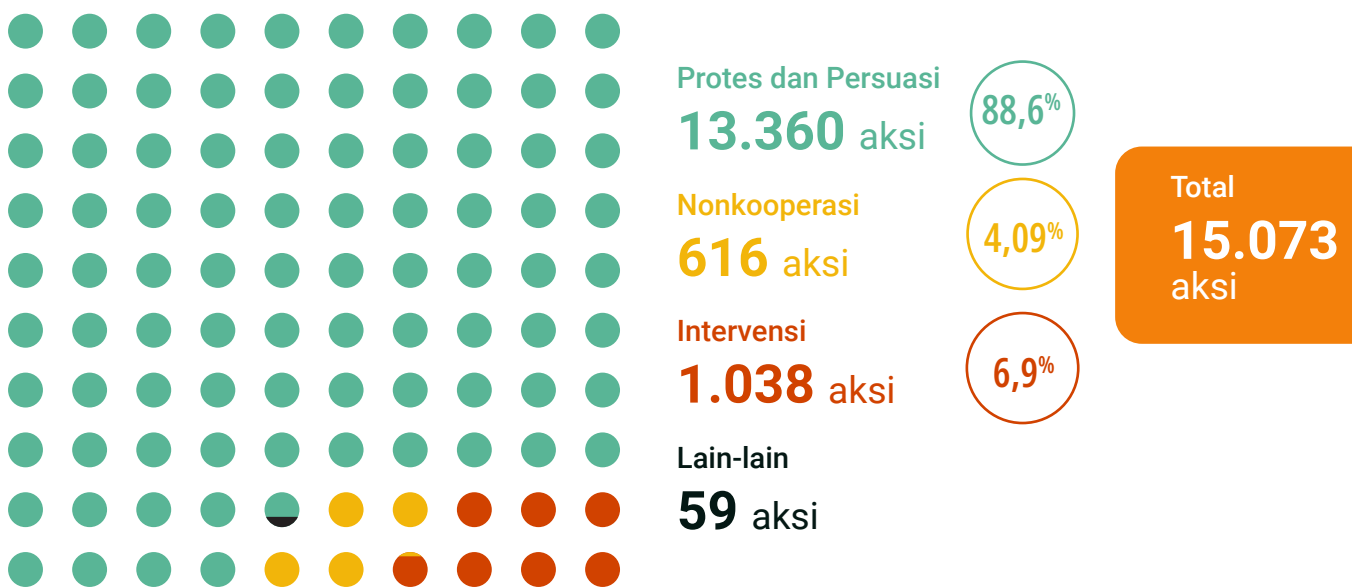


Diagram 2

Kategori aksi nirkekerasan di Indonesia era Reformasi



Ketiga, intensitas perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023 tidak menunjukkan peningkatan berarti. Konsisten dengan kecenderungan selama 25 tahun terakhir, 92,41% perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023 mengandalkan metode-metode protes dan persuasi, sementara hanya 1,12% yang memanfaatkan metode-metode nonkooperasi, dan 6,46% yang menggunakan metode-metode intervensi. Perlu dicatat bahwa persentase metode-metode intervensi meningkat dua kali, dari hanya 3,19% di tahun 2022. Salah satu yang mendorong hal ini adalah penggunaan metode mogok makan di kalangan aktivis UU PPRT. Hal lain adalah masih berlanjutnya beberapa konflik agraria dari tahun lalu, di mana warga, termasuk para perempuan, berupaya menghentikan praktik perampasan tanah miliknya atau komunitasnya dengan menduduki tanah tersebut.

Corak Perlawanan 2023

Tiga tema besar yang mewarnai perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023 adalah ketenagakerjaan, tata kelola pemerintahan, serta perampasan tanah. Tema-tema gender dan iklim yang marak di tahun-tahun sebelumnya cenderung lebih banyak ditemui di medium daring dan/atau melebur dengan perlawanan-perlawanan luring seputar tiga tema utama di atas. Di samping itu, terdapat beberapa aksi nirkekerasan yang muncul sebagai tanggapan terhadap insiden khusus, yaitu Tragedi Kanjuruhan 2022 serta genosida di Gaza sejak Oktober 2023.

Pangkalan data DPD menunjukkan bahwa, pada tahun 2023, terjadi peningkatan pesat jumlah perlawanan nirkekerasan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dua subtema yang paling mengemuka adalah pembatalan UU Cipta Kerja serta pengesahan UU PPRT. Meski berkaitan dan diusung oleh kelompok dukungan yang saling beririsan, kedua perjuangan ini memiliki corak tersendiri. Perjuangan panjang melawan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja 2020, Perppu Cipta Kerja 2022, dan UU Cipta Kerja 2023 konsisten mengandalkan paket kombo meski sasarannya bergeser dari ranah legislatif ke ranah yudikatif. Tidak ada penambahan repertoar maupun intensitas perlawanan – bahkan ada kecenderungan bahwa peran paket kombo menurun, yaitu sebatas mengawal momentum-momentum penting sepanjang proses peradilan. Sementara itu, perjuangan UU PPRT yang baru muncul pada Desember 2022 dengan cepat menarik perhatian sepanjang 2023. Di berbagai kota, para pegiatnya memadukan paket kombo dengan mogok makan. Repertoar yang dikembangkan pun diselaraskan dengan keseharian para pekerja rumah tangga, dari memasak nasi goreng untuk anggota DPR, menggantung poster tuntutan layaknya jemuran, menggelar piring kosong, menampilkan piring berisi peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

Di bidang tata kelola pemerintahan, perlawanan nirkekerasan yang ada berkisar pada tiga subtema, yaitu pemenuhan hak asasi manusia (termasuk pengusutan tuntas terhadap pelanggaran HAM masa lalu, penghentian kriminalisasi pembela HAM, penegakan keadilan gender, perlindungan untuk minoritas agama dan adat, penjaminan ruang hidup, dan sebagainya), revisi produk perundangan (termasuk UU Desa, UU Kesehatan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE, dan sebagainya), serta penyelenggaraan pemilu yang bersih (termasuk penolakan terhadap dinasti politik). Sebagian besar perlawanan nirkekerasan di tema ini menggunakan metode-metode protes dan persuasi, terutama paket kombo yang disebut sebelumnya. Ketika dikombinasikan dengan aktivisme digital pun, hampir semuanya mencerminkan perlawanan kategori “penonton,” bukan kategori “peralihan” ataupun “petarung.”³ Dengan kata lain, dalam bentuknya yang luring maupun daring, perlawanan nirkekerasan di bidang ini hanya mengandalkan metode-metode yang intensitasnya rendah. Penting dicatat di sini bahwa Aksi Kamisan yang sejak tahun 2007 setia diselenggarakan di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia konsisten menjadi ruang temu berbagai perjuangan keadilan sosial lintas tema.

³ Lihat kategorisasi aktivisme digital oleh Jordana George dan Dorothy Leidner, yang mencakup penonton, peralihan, dan petarung. Di kategori penonton, para aktivis digital “sekadar” mengafirmasi unggahan aktor lain, menyebarkannya lebih jauh, atau mengunggah pendapatnya sendiri. Di kategori peralihan, para aktivis digital melakukan boikot, mengisi petisi, menggalang dana, atau menggeruduk ruang digital. Di tingkat petarung, aktivis digital menyediakan data, membongkar informasi, atau meretas. Jordana George dan Dorothy Leidner, “*From clicktivism to hacktivism: Understanding digital activism*,” *Information and Organization* 29, no. 3 (2019).

Di tengah meningkatnya kriminalisasi petani dan masyarakat adat, perlawanan nirkekerasan terhadap praktik-praktik perampasan tanah yang sarat kekerasan terus berlangsung. Sebagaimana dilaporkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terjadi kenaikan jumlah letusan konflik agraria sebesar 12%, dari 212 letusan di tahun 2022 ke 241 letusan di tahun 2023. Catatan tahunan KPA menggarisbawahi bahwa 42 letusan (40%) di antaranya diakibatkan oleh percepatan proyek-proyek strategis nasional (PSN) dan infrastruktur penunjangnya.⁴ Di lapangan, warga mempertahankan ruang hidupnya dengan menduduki tanahnya sendiri, dan/atau memblokir akses masuk. Sementara itu, guna mengawal proses peradilan, mereka melakukan aneka kampanye daring serta menggelar paket kombo di area persidangan. Lebih sering daripada tidak, pendekatan nirkekerasan oleh petani dan masyarakat adat direspons secara kekerasan oleh aparat keamanan, terkadang berujung pada penangkapan, pemukulan, dan bahkan kematian. Di antara sengketa agraria yang paling banyak mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah Rempang, Pakel, Pulau Pari, Air Bangis, dan Dago Elos.

Di tahun 2023, tema-tema keadilan gender dan keadilan iklim yang marak di tahun 2020, 2021, dan 2022 terasa lebih gencar dikampanyekan di ranah daring. Tentu, kedua tema ini tetap menggelar aksi luring pada momen-momen penting seperti *Women's March* dan *Climate March/Strike*. Namun, kebanyakan aktivisme luring di dua tema ini berjaln berkelindan dengan perjuangan lain, termasuk seputar pencabutan UU Cipta Kerja, pengesahan UU PPRT, penghentian perampasan tanah, perlindungan terhadap pejuang HAM, pelestarian demokrasi, dan sebagainya. Di sini, keadilan gender dan keadilan iklim menjadi lensa yang semakin eksplisit irisannya serta semakin terarusutamakan dalam berbagai perjuangan keadilan sosial yang ada.

Tidak ketinggalan, tahun 2023 diwarnai beberapa perlawanan nirkekerasan yang merupakan reaksi terhadap insiden khusus. Belum tuntasnya penanganan Tragedi Kanjuruhan Oktober 2022 memunculkan aneka protes setahun setelahnya.⁵ Aneka demonstrasi, pertunjukan dan instalasi seni, serta tuntutan daring digelar di berbagai kota. Juga, serangan Hamas terhadap Israel yang dibalas secara tidak proporsional dengan agresi militer terhadap Gaza memunculkan reaksi yang masif di Indonesia dan seluruh dunia.⁶ Ratusan ribu orang memenuhi pusat kota Jakarta,⁷ dan jutaan lainnya membanjiri internet guna mengecam genosida terhadap warga Palestina. Seruan memboikot produk-produk pro-Zionisme pun membahana, meski sulit dilacak efektivitasnya. Lebih dari sekadar solidaritas kemanusiaan, aneka perlawanan nirkekerasan di isu ini telah mengubah diskursus yang ada, dari "konflik Israel-Palestina" ke "pendudukan dan genosida Israel atas Palestina."

4 Konsorsium Pembaruan Agraria, "*Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*," 17 Januari 2024.

5 Alinda Hardiantoro dan Farid Firdaus, "*Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Vonis Para Terdakwa, dan Kejanggalaan Kasusnya*," Kompas, 1 Oktober 2023.

6 Lihat bab yang ditulis oleh Kai Peter Stabell, "Babak Baru Perlawanan Nirkekerasan Palestina".

7 Indra Yoga, "*Gelar Aksi Bela Palestina, Ratusan Ribu Orang Padati Monas*," Voice of America Indonesia, 5 November 2023.

Lagu Lama, Irama Baru?

Melihat kembali bab mengenai Indonesia di refleksi tahunan DPD tahun 2020,⁸ 2021,⁹ dan 2022,¹⁰ rasanya tidak banyak yang berbeda di tahun 2023 ini. Karakter perlawanan nirkekerasan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini tidak berubah – jumlahnya tetap jauh di bawah rata-rata tahunan seperempat abad Reformasi, metodenya itu-itu lagi (paket kombo), dan intensitasnya begitu-begitu saja (protes dan persuasi). Ini mengkhawatirkan mengingat otokratisasi yang semakin menjadi, represi fisik dan digital yang semakin canggih, serta penyempitan ruang sipil yang semakin pesat.

Pada titik ini, penting diingat bahwa perlawanan nirkekerasan, baik luring maupun daring, adalah soal adu jitu (*outsmarting*) dengan lawan. Artinya, ia bukan sekadar aksi mengekspresikan kegelisahan atau reaksi guna bertahan, melainkan soal menimpakan *dilemma action* yang pas kepada lawan. Melalui serangkaian aksi nirkekerasan, aktivis memaksa lawan menghitung kembali ongkos politik, moral, ekonomi, dan sosial yang harus ditanggung jika meneruskan langkahnya. Harus diakui, dari belasan ribu aksi nirkekerasan yang dilancarkan warga sipil Indonesia sepanjang Reformasi, hanya sedikit yang mengunci lawan dengan *dilemma action* yang pas. Lebih sering daripada tidak, lawan merasa bahwa ongkos mengabaikan, atau bahkan merepresi perlawanan nirkekerasan masih “lebih murah” daripada menuruti tuntutan warga. Salah satu buktinya, lawan merasa “masih aman” mempertahankan impunitas terhadap pelanggaran HAM kendatipun Aksi Kamisan telah berlangsung 800-an kali.

Bukan berarti aneka perlawanan yang selama ini dilakukan tidak ada gunanya. Harus digarisbawahi bahwa, jika selama ini tidak dilawan, otokratisasi yang dialami hari ini akan lebih parah. Kuncinya di sini adalah membuat terobosan-terobosan yang berpeluang membalikkan keadaan. Lawan tidak boleh terus dibiarkan menimpakan *dilemma action* yang lebih pas kepada aktivis – termasuk membuat aktivis beranggapan bahwa “ongkos melawan” (seperti kehilangan pekerjaan, dikriminalisasi, dan sebagainya) lebih mahal daripada “ongkos tidak melawan.”

Kejituan lawan menimpakan *dilemma action* tidak dapat dilepaskan dari *authoritarian learning* dan *authoritarian innovations*, di mana aktor-aktor pro-otoritarianisme saling meniru strategi-strategi baru mempersempit *civic space*, mengkooptasi elemen-elemen pro-demokrasi, membajak pemilihan umum, mendistraksi publik dari isu genting, mengadopsi populisme, dan sebagainya. Pertanyaannya, dapatkah aktor-aktor pro-demokrasi mengembangkan *learning* dan *innovations* melampaui kecepatan (*outpacing*) lawannya?

8 Lihat refleksi tahunan DPD 2020, *Damai Pangkal Damai: Membela Demokrasi di Tengah Pandemi* (Yogyakarta: IIS Press, 2021).

9 Lihat refleksi tahunan DPD 2021, *Mengadang Otokratisasi: Refleksi Perlawanan Nirkekerasan di Indonesia dan Dunia 2021* (Yogyakarta: IIS Press, 2022).

10 Lihat refleksi tahunan DPD 2022, *Panjang Umur Perlawanan? Refleksi Aksi Nirkekerasan di Indonesia dan Dunia 2022* (Yogyakarta: IIS Press, 2023).

Jangan lupa bahwa, bagi lawan, langkah-langkah yang mereka ambil guna melembagakan otoritarianisme adalah bagian dari pekerjaan profesional penuh waktu (*full-time paid job*) mereka. Ini berbeda dengan sebagian besar aktivis pro-demokrasi yang pekerjaannya penuh waktunya adalah petani, pemimpin agama atau kepercayaan, guru, buruh, pekerja rumah tangga, orang tua, (maha)siswa, jurnalis, dan sebagainya. Tidak mengherankan bahwa, sedikit demi sedikit, lawan berhasil membangun infrastruktur represi yang maju, yang memudahkan mereka mencapai tujuan. Termasuk di sini adalah produk perundangan yang mencederai aspirasi rakyat, lembaga eksekutif/legislatif/yudikatif yang tidak selalu pro-rakyat, sistem pendidikan yang mementingkan penyerapan lapangan kerja dan mobilitas vertikal daripada pemikiran kritis dan solidaritas antarkelompok, dan sebagainya. Apa saja infrastruktur perlawanan yang perlu dibangun sehingga “ongkos melawan” yang harus dibayar masing-masing warga menjadi lebih murah daripada “ongkos tidak melawan”? Tidak berlebihan rasanya mengatakan bahwa hadirnya ratusan ribu warga di Jakarta pada November 2023 guna bersolidaritas dengan Palestina tidak dapat dilepaskan dari penilaian bahwa “ongkos melawan” hampir tidak ada, mengingat pemerintah bahkan ikut mensponsori kegiatan tersebut. Justru, “ongkos tidak melawan” lebih mahal, terutama secara sosial, mengingat stigma yang lumayan berat bagi yang tidak secara eksplisit menyatakan penolakan terhadap zionisme dan pendudukan Israel atas Palestina.

Tidak jauh berbeda dari catatan penutup refleksi perlawanan nirkekerasan tahun-tahun sebelumnya, tulisan ini menggarisbawahi perlunya memperluas repertoar dan meningkatkan metode aksi nirkekerasan. Juga, tulisan ini mengingatkan pentingnya mengembangkan bingkai bahwa mereka yang melawan ketidakadilan sosial adalah warga yang cinta tanah airnya dan menjalankan tugas kewargaannya. Bukankah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan amanat dasar negara dan konstitusi kita? Mari bergerak, sebelum prinsip yang paling mendasar ini diubah, dan segalanya menjadi terlambat.

PALACIO DE JUSTICIA



Perjalanan Gerakan Maksimalis 2023: Yang Berlanjut, Yang Bangkit, dan Yang Berjaya

Dhania Salsha Handiani

Menjawab serentetan tantangan dan ancaman sepanjang tahun 2022, beberapa gerakan secara lihai berganti dari agenda maksimalis ke reformis. Pada tahun 2023, fleksibilitas ini memungkinkan gerakan-gerakan yang ada untuk secara gigih bertahan. Bagaimana pergeseran tujuan suatu gerakan berkontribusi pada ketahanan mereka? Apakah tahun 2023 diwarnai perlawanan-perlawanan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya?

Di sini, Damai Pangkal Damai (DPD) merujuk pada definisi gerakan maksimalis dan gerakan reformis yang dikenalkan oleh Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes (NAVCO) Data Project.¹ Sebagaimana namanya, gerakan maksimalis (*maximalist campaign*) mendorong perubahan maksimal, yakni menggulingkan pemerintahan yang dinilai otoriter atau tidak memenuhi aspirasi rakyat. Adapun gerakan reformis (*reformist campaign*) mengusung perubahan di isu-isu spesifik saja, tanpa keharusan berganti pemerintahan.

DPD juga merujuk pada tahapan-tahapan revolusi yang diidentifikasi oleh George Lakey dalam "Manifesto for Nonviolent Revolution"-nya.² Supaya berhasil sampai ke tahap akhir, Lakey mengatakan bahwa sebuah gerakan harus melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap penyadaran (*conscientization stage*), yang diwarnai peningkatan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya melakukan perlawanan nirkekerasan. Di tahap kedua, yaitu tahap pengorganisasian (*organizing stage*), massa berkumpul guna meningkatkan solidaritas serta komitmen mereka terhadap disiplin nirkekerasan. Di tahap ketiga, yakni tahap konfrontasi (*confrontation stage*), aksi nirkekerasan dilakukan secara berkelanjutan guna menasar lawan dan pilar-pilar pendukungnya. Di tahap keempat, atau tahap nonkooperasi massal (*mass non-cooperation stage*), perlawanan diamplifikasi dengan menarik dukungan politik dan ekonomi masyarakat melalui metode-metode nonkooperasi dan intervensi nirkekerasan. Yang terakhir adalah tahap pemerintahaan paralel (*parallel government stage*), di mana gerakan membangun rezim dan institusi alternatif guna menggantikan rezim yang dijatuhkan.

¹ Weatherhead Center for International Affairs, "[What is a maximalist campaign?](#)" 2023.

² George Lakey, [A Manifesto for Nonviolent Revolution](#) (Philadelphia: Movement for a New Society, 1976).

Dalam refleksi edisi 2022 sebelumnya, DPD mencatat intensifikasi perlawanan sipil Sudan di tengah kemunduran gerakan maksimalis di Hong Kong, Belarusia, Thailand, dan Aljazair. Dokumen tersebut juga menyoroti gerakan-gerakan di Afghanistan, Rusia, dan Guatemala yang mengubah orientasi mereka dari maksimalis menjadi reformis, beserta munculnya gerakan-gerakan baru di Iran, Sri Lanka, Tunisia, Tiongkok, Ekuador, Panama, dan Albania. Memasuki tahun 2023, perlawanan di Hong Kong, Belarusia, dan Aljazair tidak menunjukkan perkembangan sama sekali, sementara gerakan di Sri Lanka, Tiongkok, Albania, dan Ekuador berhasil mencapai tujuannya. Dengan mengesampingkan tujuh gerakan tersebut, refleksi tahunan edisi 2023 ini mengangkat keberlangsungan perlawanan di Afghanistan, Rusia, Panama, Tunisia, dan Guatemala, kemunduran perlawanan di Sudan dan Iran, beserta kebangkitan perlawanan di Myanmar dan Thailand. Edisi ini juga merayakan munculnya gerakan-gerakan baru di Peru, Suriah, Polandia, Bangladesh, Ghana, Afrika Selatan, dan Madagaskar.

Bergeser untuk Bertahan

Pada tahun 2023, perlawanan di **Afghanistan, Rusia, Panama, Guatemala, dan Tunisia** mampu mempertahankan kehadiran mereka sebagaimana tahun 2022. Di empat kasus pertama, keberhasilan gerakan dalam bertahan ditopang oleh kelihaihan bergeser dari tujuan-tujuan maksimalis ke reformis. Di kasus kelima, gerakan bertahan dengan mempertahankan agenda maksimalisnya.

Di **Afghanistan** dan **Rusia**, keberlangsungan gerakan ditentukan oleh pilihan yang diambil pada tahun 2022 untuk berubah dari tuntutan maksimalis ke tuntutan reformis. Pada tahun 2021, gerakan-gerakan tersebut secara terbuka menuntut turunnnya pemerintahan Taliban dan pemerintahan Putin, yang kemudian berhadapan dengan represi berlebihan dari negara. Mengingat ketimpangan yang luar biasa antara aparat keamanan dan warga sipil, gerakan di Afghanistan pun menggeser fokus mereka pada hak-hak perempuan, sementara gerakan di Rusia memilih menyoroti perang Rusia-Ukraina yang menyangsarakan warga. Melanjutkan perjalanan tersebut, perlawanan di Afghanistan tahun 2023 didominasi oleh kelompok perempuan, yang menuntut hak-hak dasar mereka melalui *march* (metode #38) dan unjuk rasa (metode #47), umumnya di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),³ di luar berbagai universitas di awal tahun ajaran baru,⁴ serta di tempat maupun fasilitas yang dilarang oleh Taliban (seperti salon-salon kecantikan).⁵ Di Rusia, perempuan juga rutin memimpin *march* (metode #38) dan demonstrasi (metode #47) di ibu kota Moskow guna menuntut kepulangan suami dan anak mereka dari medan perang,⁶ disertai pendirian situs-situs memorial di berbagai belahan Rusia guna menandai lokasi terjadinya kekerasan negara (metode #43).⁷ Secara

3 Daniel Bellamy, "Afghan women protest in Kabul demanding the Taliban aren't recognised," Euronews, 29 April 2023.

4 Ehsan Popalzai, Shafi Kakar, Niamh Kennedy dan Jessie Yeung, "Afghan women protest outside Kabul University as male students return to class," CNN, 6 Maret 2023.

5 Deutsche Welle, "Afghanistan: Women protest Taliban ban on beauty salons," 19 Juli 2023.

6 Pjotr Sauer, "We're tired of being good girls': Russia's military wives and mothers protest against Putin," The Guardian, 25 Desember 2023.

7 Valerie Hopkins dan Nanna Heitmann, "In Moscow, a Quiet Antiwar Protest With Flowers and Plush Toys," The New York Times, 23 Januari 2023.

strategis, keputusan menyoroti isu-isu spesifik tersebut menjadi pintu masuk lebih “aman” bagi gerakan daripada mengusung isu besar perubahan rezim. Di sini, simpati masyarakat luas dan komunitas internasional dapat terus digalang tanpa harus berhadapan dengan represi negara, dan selanjutnya dapat dialihkan menjadi kampanye pelemahan legitimasi rezim. Sebagai ilustrasi, perjuangan di Afghanistan berhasil mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk penindasan rezim Taliban terhadap perempuan dan anak, yang kemudian memantik penelusuran mendalam tentang masalah HAM dan ekonomi di negara tersebut.⁸ Sementara itu, berdasarkan jajak pendapat yang digelar oleh *Institute for the Study of War* (ISW), berkurangnya jumlah dukungan warga Rusia terhadap perang Ukraina telah menyebabkan kekhawatiran di kalangan rezim mengenai efektivitas kampanye Putin menghadapi pemilihan presiden di negara tersebut pada tahun 2024.⁹

Di **Panama**, alasan pergeseran orientasi, dari maksimalis ke reformis, sedikit berbeda. Jika di Afghanistan dan Rusia pergeseran terjadi pada tahun 2022 karena represi berlebihan dari rezim, di Panama, pergeseran baru terjadi pada tahun 2023, justru karena adanya “buahian” (*ap-peasement*) rezim. Menyusul masifnya demonstrasi dan blokade jalan menuntut lengsernya Presiden Laurentino Cortizo yang dinilai tidak becus mengurus perekonomian, di akhir tahun 2022 pemerintah pun menawarkan penurunan harga gas sebesar 24%. Akibatnya, pada tahun 2023, gerakan di Panama secara strategis menggeser tuntutan mereka pada isu proyek pertambangan pemerintah. Diorganisir oleh para pemimpin adat, aktivis lingkungan hidup, dan serikat buruh, demonstrasi yang diadakan di kota-kota Panama City, Colón, La Chorrera, Penonomé, Santiago, dan David (metode #47) berhasil mengundang partisipasi ribuan warga Panama.¹⁰ Demonstrasi tersebut disertai aksi blokade Jalan Raya Pan-Amerika di berbagai titik berbeda (metode #172)¹¹ dan pemogokan oleh serikat guru (metode #97)¹² selama berminggu-minggu. Melalui aksi-aksi tersebut, gerakan di Panama secara eksplisit mengumbar korupsi dan eksploitasi pemerintahan Cortizo – sebagai upaya mendorong khalayak umum supaya semakin gencar mengkritik pemerintah atas kegagalan mereka memenuhi tuntutan rakyat.¹³

Sementara itu, di **Guatemala**, pergeseran orientasi dilatarbelakangi oleh keberhasilan gerakan maksimalis pada tahun 2022 dalam menangkalkan pencalonan Alejandro Giammattei dan rezim korupnya untuk kedua kalinya. Di tahun 2023, gerakan ini pun menggeser orientasinya menjadi reformis, yakni dengan isu khusus menjaga proses transisi pemerintahan di tengah maraknya ancaman kekuatan revisionis. Ketika Jaksa Agung Consuelo Porras melakukan serentetan investigasi palsu guna menghalangi pelantikan presiden baru Bernaro Arévalo, demonstrasi besar-besaran (metode #47) pun digelar hingga mampu mendorong pengunduran diri

8 NEWS WIRES, “*UN Security Council unanimously condemns Taliban’s crackdown on women’s rights*,” France 24, 28 April 2023.

9 Joshua Askew, “*Russians’ support of Ukraine war collapses, finds poll*,” Euronews, 2 Desember 2023.

10 María Mónica Monsalve Sánchez, “*Mass protests in Panama to reject new concession for largest copper mine in Central America*,” El País, 27 Oktober 2023.

11 Megan Janetsky, “*Anti-mining protesters in Panama say road blockades will be suspended for 12 hours on Monday*,” Associated Press, 13 November 2023.

12 France 24, “*Las clases se reanudarán en Panamá tras seis semanas de paro por contrato minero*,” 3 November 2023.

13 Luke Taylor, “*Historic moment: Panama activists celebrate ruling against copper mine*,” The Guardian, 28 November 2023.

Porras serta mengamankan kepresidenan Arévalo.¹⁴ Diorganisir oleh para pemimpin adat Guatemala, unjuk rasa tersebut dihadiri oleh ribuan pelajar, tenaga profesional, pekerja sektor publik, pekerja sektor informal, dan petani dari seluruh penjuru negeri.¹⁵ Aksi ini dilakukan berbarengan dengan acara doa bersama dan upacara spiritual (metode #20),¹⁶ mogok kerja (metode #97),¹⁷ dan blokade terhadap 140 jalan raya (metode #171 dan #172).¹⁸

Berbeda dengan keempat gerakan di atas, perlawanan nirkekerasan di **Tunisia** secara konsisten mempertahankan orientasi maksimalis dari tahun-tahun sebelumnya. Sembari meneriakkan “Hentikan kudeta!” dan “Bebaskan semua tahanan!” (metode #7 dan #8), ratusan warga secara rutin berdemonstrasi di ibu kota Tunis guna menuntut pembubaran pemerintahan otoriter Kais Saied dan pembebasan para tokoh oposisi yang ditahan.¹⁹ Beberapa tokoh terkemuka seperti Abir Moussi – salah satu pemimpin pemimpin *Free Constitutional Party* (PDL) – juga melakukan mogok makan (metode #159) di dalam tahanan guna memprotes pembatasan hak berekspresi dan politik mereka.²⁰

Kelima perlawanan sipil di atas tampaknya berhasil sampai di tahap konfrontasi, di mana aliansi antarwarga telah terbentuk secara matang sehingga perlawanan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Namun, mengingat bahwa pertumbuhan gerakan tidak selalu linear, penting digarisbawahi bahwa masing-masing gerakan memiliki trayektori berbeda untuk sampai ke posisinya saat ini.

Sama-sama bermula sebagai gerakan maksimalis, perlawanan di Afghanistan, Rusia, dan Panama telah bergeser menjadi gerakan reformis. Alasannya berbeda-beda, dari (1) kebutuhan mengelak represi, mengingat lebih “mudah” dan “aman” mengangkat isu-isu reformis karena tidak secara frontal menantang rezim, (2) kebutuhan menyesuaikan diri dengan konsesi dari lawan, di mana kemenangan-kemenangan kecil perlu diamankan sambil terus mengupayakan tujuan besar, serta (3) kebutuhan mengamankan tujuan besar yang berhasil diraih, sehingga tidak mudah dibalikkan kembali. Dengan kata lain, pergeseran orientasi bisa berakar dari pukulan balik dari lawan, stagnasi, kemenangan kecil, maupun kemenangan besar.

Sementara itu, bagi warga Tunisia, mempertahankan orientasi maksimalis dalam gerakan merupakan hal yang mutlak demi mencegah kemunduran demokrasi mereka yang ternilai masih muda. Bahkan, banyak tokoh lokal memandang gerakan di Tunisia saat ini sebagai warisan perjuangan *Arab Spring* tahun 2010, sebagai “intifada” menyelesaikan revolusi yang belum tuntas.²¹

14 Shannon K. O’Neil dan Will Freeman, “*Guatemala’s Protests Go National, Plus Meddling Ex-Presidents and a Thaw in U.S.-Venezuela Relations*,” Council on Foreign Relations, 16 Oktober 2023.

15 Shannon K. O’Neil dan Will Freeman, “*Guatemala’s Protests Go National, Plus Meddling Ex-Presidents and a Thaw in U.S.-Venezuela Relations*,” Council on Foreign Relations, 16 Oktober 2023.

16 Jeff Abbott, “*Guatemala’s Indigenous leaders take to the streets in nationwide protests*,” Al Jazeera, 11 Oktober 2023.

17 Astrid Galván, “*In photos: Pro-democracy Guatemalan protesters remain defiant*,” Axios, 26 Oktober 2023.

18 Jeff Abbott, “*Guatemala’s Indigenous leaders take to the streets in nationwide protests*,” Al Jazeera, 11 Oktober 2023.

19 Al Jazeera, “*Tunisia protest marks two years since president’s power grab*,” 25 Juli 2023.

20 Tarek Amara, “*Tunisian opposition figure Moussi begins hunger strike in prison*,” Reuters, 29 November 2023.

21 Edna Mohamed, “*Incomplete revolution: Tunisia crackdown slammed by critics*,” Al Jazeera, 25 Juni 2023.

Kemunduran dan Kebangkitan

Tahun 2023 juga menjadi saksi kemunduran dan kebangkitan beberapa gerakan perlawanan. Berkebalikan dari kedahsyatan mereka pada tahun sebelumnya, perlawanan sipil di **Iran** dan **Sudan** mengalami penurunan drastis pada tahun 2023. Sementara itu, gerakan di **Myanmar** dan **Thailand**, yang sempat meredup pada tahun 2022, tampak bergelora kembali.

Di **Iran**, perlawanan masif yang dipantik oleh kematian Mahsa Amini pada tahun 2022 telah menorehkan predikat protes terbesar sejak Revolusi Islam tahun 1979. Sayangnya, hal ini mengundang represi besar-besaran dari pihak pemerintah. Selain membatasi akses internet dan memblokir berbagai platform media sosial, pemerintah secara terang-terangan menggunakan gas air mata, peluru tajam, dan bentuk kekerasan lainnya guna menekan para pengunjuk rasa – yang dibantu dan didukung penuh oleh anggota paramiliter Basij.²² Mengingat usia perlawanan yang masih belia, warga seperti tidak memiliki pilihan selain menghentikan aksi mereka supaya dapat memulihkan diri dari tindakan represif negara yang telah memakan 500 korban jiwa, melukai ratusan demonstran, dan memenjarakan puluhan jurnalis.²³ Di tengah tidak adanya proses peradilan yang berarti bagi para tahanan, pemerintah tidak perlu berpikir dua kali untuk mengeksekusi mati warganya.²⁴

Bagi gerakan perlawanan di **Sudan**, tahun 2022 merupakan tahun ketiga memperjuangkan transisi menuju demokrasi sejak pemakzulan Omar al-Bashir pada tahun 2019. Sayangnya, berbagai aksi yang dilakukan warga terpaksa dihentikan pasca terjadinya perang saudara antara militer Sudan dan kelompok paramiliter *Rapid Support Forces* (RSF) di bulan April 2023,²⁵ yang mengakibatkan kematian 9.000 warga Sudan dan pengungsian 5,6 juta lainnya per Oktober 2023.²⁶ Selain demi menjaga keselamatan, warga memutuskan menghentikan protes mingguan mereka karena adanya kebutuhan-kebutuhan lain yang harus diprioritaskan; misalnya, beberapa pemimpin gerakan harus mengambil peran baru dalam mengelola dan mendistribusikan pasokan bahan pokok untuk warga yang terdampak perang, membantu mengangkut korban ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat, membantu proses pengungsian warga beserta keluarga mereka sendiri, dan lain-lain.²⁷

Berbeda dengan kedua gerakan di atas, tahun 2023 menjadi saksi kebangkitan aksi-aksi nirkekerasan di **Myanmar** dan **Thailand** yang sebelumnya meredup di 2022. Akibat meningkat-

22 Parisa Hafezi, "What has changed in Iran one year since Mahsa Amini protests erupted?" Reuters, 13 September 2023.

23 Kouros Ziabari, "Female Protests in Iran: One Year Later," United States Institute of Peace, 6 September 2023.

24 Amnesty International, "Iran: Executions of tortured protesters must trigger a robust reaction from the international community," 19 Mei 2023.

25 Pada tahun 2019, kelompok *Sudanese Armed Forces* (SAF) dan kelompok paramiliter *Rapid Support Forces* (RSF) sempat bekerja sama dalam upaya menggulingkan Presiden Bashir, yang kemudian disusul oleh terpilihnya perwakilan masyarakat sipil Abdalla Hamdok sebagai perdana menteri Sudan. Pada tahun 2021, keduanya kembali melancarkan kudeta terhadap Hamdok yang memicu terjadinya protes besar-besaran. Setelah menyetujui penyerahan sebagian kekuasaan kepada kedua faksi bersenjata tersebut, Hamdok berhasil diangkat kembali pada bulan November 2021. Namun, atas dasar ketidakpuasan warga terhadap kinerjanya, Hamdok kembali mengundurkan diri pada tahun 2022. Hal ini pun mendorong perebutan kekuasaan antara SAF dan RSF di tengah adanya kekosongan kekuasaan.

26 Kate Bartlett dan Emmanuel Akinwotu, "Sudan's war passed 6 months, with much of the world consumed by other conflicts," NPR, 21 Oktober 2023.

27 Arthur Larie, "I believe this war will destroy Sudan: the coup protesters now on the run," The Guardian, 13 Juli 2023.

nya represi oleh junta militer, perlawanan sipil Myanmar sempat hanya dapat mengandalkan aksi diam di awal tahun 2022, di mana perjuangan ini pun kemudian diambil alih oleh berbagai kelompok bersenjata seperti *People's Defence Forces* (PDF),²⁸ dan mendorong pecahnya perang saudara di Myanmar di tahun tersebut. Di Thailand, penurunan jumlah dan intensitas perlawanan sipil pada tahun 2021 dan 2022 tidak bisa dilepaskan dari penahanan ribuan aktivis pro-demokrasi.²⁹

Dalam kasus **Myanmar**, bangkitnya perlawanan sipil pada tahun 2023 berawal dari meningkatnya kesadaran warga yang menjadi bagian dalam pilar-pilar pendukung junta militer. Di tengah operasi militer yang dilakukan, 10.000 anggota militer yang terdiri dari 3.000 tentara dan 7.000 petugas polisi beramai-ramai membelot (metode #148) akibat beban moral yang mereka rasakan saat ditugaskan membunuh warga sipil tidak bersalah.³⁰ Melemahnya junta militer pun memungkinkan para kelompok pemberontak merebut kembali sebagian besar wilayah pendudukan dan (yang terpenting!) memicu para warga untuk kembali melakukan apa yang disebut Lakey sebagai "tahap pengorganisasian" – tahap di mana masyarakat kembali berkumpul untuk mengkonsolidasikan kehadiran dan komitmen mereka terhadap perlawanan nirkekerasan. Banyak warga yang ingin melawan, tetapi tidak semua memiliki kapasitas (baik secara fisik ataupun mental) untuk mempersenjatai diri. Karenanya, 40 komite aksi damai pun bermunculan di berbagai kota dan memprakarsai unjuk rasa di daerah Kani, Mingin, Salingyi, Yinmarbin, Kalay, Khin-U, Ye-U, and Chaung-U (metode #47, ditemani oleh metode #7, #8 dan #38).³¹ Ini diikuti dengan penggunaan metode-metode nirkekerasan dengan intensitas lebih tinggi, seperti aksi turun dan membajak sawah yang dilarang oleh pemerintah (metode #141), memboikot perusahaan-perusahaan milik militer (metode #71), dan menolak pemilu yang disponsori militer (metode #124).³²

Sementara itu, di **Thailand**, gerakan pro-demokrasi kembali menampakkan batang hidungnya menyusul kemenangan partai demokrat progresif *Move Forward Party* (MFP) yang memiliki visi dan misi menentang kekuasaan elite militer di sistem pemerintahan. Walaupun belum bisa menyamai cakupan protes pada tahun-tahun silam, pembatasan yang dikenakan terhadap anggota MFP Pita Limjaroenrat ketika mencalonkan dirinya sebagai perdana menteri Thailand mendorong ribuan warga untuk kembali menggelar demonstrasi besar-besaran (metode #47) sambil meneriakkan slogan "Senator, keluar!" (metode #7) dan memblokir berbagai persimpangan jalan utama (metode #172).³³

Berdasarkan contoh-contoh di atas, apakah redupnya aksi nirkekerasan dan munculnya kelompok bersenjata mencerminkan kegagalan sebuah perlawanan sipil?

28 Jonathan Head, "[Myanmar: Why once peaceful protesters are now choosing violence](#)," BBC, 30 Januari 2022.

29 Emmy Sasipornkarn, "[Thailand: What happened to monarchy protest movement?](#)" Deutsche Welle, 17 November 2022.

30 Miemie Winn Byrd dan Daniel K. Inouye, "[Unifying efforts Against The Military Junta](#)," Indo-Pacific Defense FORUM, 18 Desember 2023.

31 RFA Burmese, "[Myanmar's Sagaing region sees a resurgence of anti-junta protests](#)," Radio Free Asia, 17 Oktober 2023.

32 RFA Burmese, "[Myanmar's Sagaing region sees a resurgence of anti-junta protests](#)," Radio Free Asia, 17 Oktober 2023.

33 Sebastian Strangio, "[Move Forward Supporters Gather in Bangkok to Protest Obstructed PM Bid](#)," The Diplomat, 24 Juli 2023.

Di banyak kasus, menghentikan sebuah perlawanan di tengah eskalasi konflik yang ekstrem – contohnya, saat berhadapan dengan perang atau tindakan represif besar-besaran – dapat dipandang sebagai suatu keharusan guna mencegah semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan. Sebuah “hiatus” tentunya juga bisa dilihat sebagai periode perencanaan dan pengorganisasian lebih lanjut. Walaupun hal ini mencerminkan ketidakmampuan sebuah gerakan mencapai tuntutannya dalam suatu periode tertentu, bukan berarti perlawanan nirkekerasan warga menghilang begitu saja. Seperti yang terjadi di Thailand, gerakan yang memilih untuk mengambil langkah mundur di tengah keadaan genting dapat memperoleh momentum baru dan membangun kembali perlawanan mereka.

Sejarah panjang protes di Iran pun tidak luput dari periode-periode “hiatus” yang berperan sebagai pijakan bagi gelombang-gelombang protes baru di negara tersebut. Periode “pencarian jati diri” yang terjadi setelah penumpasan protes mahasiswa pada tahun 1999, misalnya, berperan sebagai modal pembentukan Gerakan Hijau 2009 yang bertujuan mengkritik kondisi ekonomi dan teokrasi di Iran.³⁴ Selain bermanfaat bagi perencanaan taktik dan strategi gerakan di masa mendatang, sebuah jeda dalam perlawanan juga dapat digunakan untuk menyiapkan institusi-institusi alternatif (termasuk pemerintahan paralel dan pemerintahan transisi) yang dibutuhkan menyusul kesuksesan sebuah gerakan maksimalis. Di Sudan, hal ini dapat mencegah adanya vakum kekuasaan menyusul penggulingan diktator Omar al-Bashir pada tahun 2019 dan lengsernya Perdana Menteri Hamdok pada tahun 2022 yang memungkinkan pecahnya sebuah perang saudara.

Bagaimana dengan peralihan perlawanan sipil ke perlawanan bersenjata yang terjadi di Myanmar? Apakah hal tersebut menggambarkan kegagalan mutlak sebuah gerakan nirkekerasan? Munculnya kembali masyarakat sipil yang melakukan aksi nirkekerasan pada tahun 2023 bisa menjadi bantahan terhadap kepercayaan tersebut. Mengingat bahwa pelemahan junta militer bisa terjadi karena penolakan para personel dalam membantai warga tak bersalah, kita dapat menyoroti pentingnya *jiu-jitsu* moral dan politik dalam upaya melanjutkan perlawanan anti-junta militer di negara tersebut – dan ini hanya bisa dimunculkan oleh perlawanan nirkekerasan. Keberadaan perlawanan bersenjata tidak harus menihilkan nilai perlawanan sipil yang ada. Jika dikelola dengan baik, perlawanan sipil nirkekerasan niscaya dapat melampaui popularitas dan efektivitas perlawanan bersenjata.

Wajah Baru Perlawanan

Tahun 2023 tentunya juga menyaksikan kemunculan gerakan-gerakan maksimalis baru. Termasuk di dalamnya adalah perlawanan berskala besar di **Suriah, Bangladesh, Peru, dan Polandia**, serta beberapa perlawanan jangka pendek di **Ghana, Afrika Selatan, dan Madagaskar**.

Di **Suriah** dan **Bangladesh**, kehadiran gerakan maksimalis dipicu oleh gejolak ekonomi yang memunculkan tuntutan penggulingan pemerintahan di masing-masing negara. Di Suriah,

³⁴ United States Institute of Peace, “*FACT SHEET: Protests in Iran 1979-2023*,” 30 Mei 2023.

march (metode #38) dan demonstrasi (metode #47) pertama kali muncul di provinsi Suwayda guna mengkritik keputusan pemerintah untuk mengakhiri subsidi bahan bakar di tengah memburuknya perekonomian negara tersebut.³⁵ Sementara itu, protes di Bangladesh sudah dimulai semenjak bulan Desember 2022 sebagai kritik terhadap ketidakmampuan Perdana Menteri Sheikh Hasina dalam mengelola kenaikan harga komoditas dan inflasi yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina.³⁶

Di kedua negara tersebut, membludaknya partisipasi warga pada aksi-aksi perdana memudahkan masing-masing gerakan untuk melalui tahap penyadaran dan tahap pengorganisasian, sebelum memulai tahap konfrontasi dan nonkooperasi massal. Selain melakukan unjuk rasa di jalanan, rasa percaya diri yang secara cepat tumbuh dalam gerakan Suriah memungkinkan warga untuk secara terang-terangan menyerukan penggulingan Presiden Bashar al-Assad melalui aksi merobek potret al-Assad (metode #30), mogok kerja (metode #97),³⁷ mengelas pintu-pintu kantor pemerintah (metode #172),³⁸ dan memblokade jalanan-jalanan penting di negara mereka (metode #171 dan #172).³⁹ Menggunakan ragam metode yang berbeda, puluhan ribu warga Bangladesh juga berhasil secara rutin menggelar unjuk rasa (metode #47) dan *march* (metode #38) sepanjang tahun 2023, sembari menyerukan boikot terhadap pemilu mendatang (metode #124) jika perdana menteri mereka menolak untuk mengundurkan diri.⁴⁰

Sementara itu, munculnya gerakan maksimalis di **Peru** dan **Polandia** didasarkan pada kemunduran demokrasi di kedua negara tersebut. Di Peru, warga bersikeras menuntut pengunduran diri Presiden Dina Boluarte – yang dilantik pada Desember 2022 sebagai pengganti Presiden Pedro Castilla yang dimakzulkan – karena menunjukkan sifat otoriter melalui penolakan penyelenggaraan pemilihan umum di masa mendatang.⁴¹ Sementara itu, masyarakat Polandia melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Andrzej Duda dan Perdana Menteri Mateusz Morawiecki yang baru-baru ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang “*Lex Tusk*” yang mengikis pemisahan kekuasaan negara dan mempersulit proses pencalonan pemimpin oposisi dalam pemilihan umum Polandia.⁴²

Semasa perjuangannya, gerakan maksimalis Peru memanfaatkan berbagai metode nirkekerasan – mulai dari metode-metode protes dan persuasi, hingga metode-metode nonkooperasi dan intervensi nirkekerasan yang intensitasnya lebih tinggi. Selain mengandalkan puluhan ribu pengunjuk rasa yang kerap memenuhi jalanan Peru (metode #38 dan #47),⁴³ perlawanan juga diwarnai blokade jalan-jalan utama di kota Puno, Arequipa, Junín, Cusco, dan Apurímac

35 Al Jazeera, “*Antigovernment protesters tear down picture of al-Assad in Syria’s Sweida*,” 8 September 2023.

36 Vedika Sud dan Yong Xiong, “*Tens of thousands protest in Bangladesh to demand resignation of Prime Minister Sheikh Hasina*,” CNN, 11 Desember 2022.

37 Al Jazeera, “*Antigovernment protesters tear down picture of al-Assad in Syria’s Sweida*,” 8 September 2023.

38 Al Jazeera, “*Antigovernment protesters tear down picture of al-Assad in Syria’s Sweida*,” 8 September 2023.

39 Ruth Michaelson, “*Syrian protests enter second week with calls for Assad to go*,” The Guardian, 28 Agustus 2023.

40 Reuters, “*Bangladesh opposition vows to continue protests despite ‘autocratic’ crackdown*,” 29 November 2023.

41 Omar Coronel, “*Understanding the protests in Peru*,” Al Jazeera, 15 Februari 2023.

42 Reuters, “*Polish president signs ‘Tusk Law’ on undue Russian influence*,” 29 Mei 2023.

43 Marco Aquino, “*Protesters take to Peru’s streets, some met with tear gas in capital*,” Reuters, 20 Juli 2023.

(metode #172),⁴⁴ serta mogok kerja yang dilakukan para pekerja tambang dan serikat pekerja tambang (metode #97).⁴⁵ Sementara itu, gerakan perlawanan di Polandia termanifestasi dalam gelombang *march* (metode #38) dan demonstrasi (metode #47) di ibu kota Warsawa dan kota-kota besar lainnya seperti Kraków, Szczecin, dan Poznań, yang berhasil merangkul 300.000 hingga 500.000 warga dan berlangsung dari bulan Juni hingga Oktober 2023.⁴⁶

Tidak ketinggalan, muncul berbagai perlawanan baru di benua Afrika. Selama tiga hari, ratusan warga yang mengenakan pakaian berwarna hitam dan merah (metode #19) – kombinasi yang melambangkan penderitaan – berdemonstrasi di jalanan ibu kota Accra (metode #47), sembari meneriakkan slogan “Hentikan penjarahan, kami menderita!” (metode #7 dan #8), memprotes ketidakmampuan pemerintah mengatasi krisis keuangan berkelanjutan di **Ghana**.⁴⁷ Di **Afrika Selatan**, demonstrasi anti-pemerintah yang dipimpin oleh anggota *Economic Freedom Fighters* (EFF) dilaksanakan selama beberapa minggu guna mengkritik krisis listrik, tingginya angka kriminalitas, dan kegagalan ekonomi yang melanda negara tersebut.⁴⁸ Sementara itu, di **Madagaskar**, demonstrasi di ibu kota Antananarivo yang dihadiri anggota oposisi diselenggarakan guna memprotes pencalonan kembali Presiden Andry Rajoelina sembari menuntut proses pemilihan umum yang adil dan transparan.⁴⁹ Selain unjuk rasa, warga juga beramai-ramai mendirikan barikade sepanjang Avenue de l'Indépendance dan Place du 13 Mai (metode # 172).⁵⁰

Gerakan-gerakan maksimalis yang baru muncul pada tahun 2023 ini memiliki ukuran dan durasi yang berbeda-beda. Dalam empat gerakan pertama, basis dukungan yang kuat memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan dan masifnya protes mereka. Di Polandia, ini ditopang kehadiran tokoh-tokoh politik ternama seperti mantan Perdana Menteri Donald Tusk, mantan Presiden dan pemimpin gerakan *Solidarity* Lech Walesa, Walikota Warsawa Ralf Trzaskowski, aktivis sosial Sylwia Gregorczyk-Abram, dan pemimpin *New Left* Włodzimierz Czarzasty.⁵¹ Sementara itu, kecilnya dukungan terhadap perlawanan sipil di Ghana, Afrika Selatan, dan Madagaskar kemungkinan besar dipengaruhi oleh masifnya kehadiran polisi dan militer sedari awal aksi berlangsung.

44 The Red Phoenix, “*In Peru the fight against Dina Boluarte continues*,” 18 Januari 2023.

45 Marina E. Franco, “*Peru’s anti-government movement reignited months after deadly protests*,” Axios, 19 Juli 2023.

46 Vanessa Gera, “*Hundreds of thousands march in Poland anti-government protests to show support for democracy*,” Associated Press, 5 Juni 2023.

47 Jeffrey Haynes, “*#OccupyBoG: Social protest movements and radical political change in Ghana*,” Democracy in Africa, November, 2023.

48 Felix Maringa, “*What’s driving Africa’s demonstrations?*,” Deutsche Welle, 6 April 2023.

49 Rédaction Africanews, “*Madagascar: Opposition candidates protest “institutional coup”*,” 15 Oktober 2023.

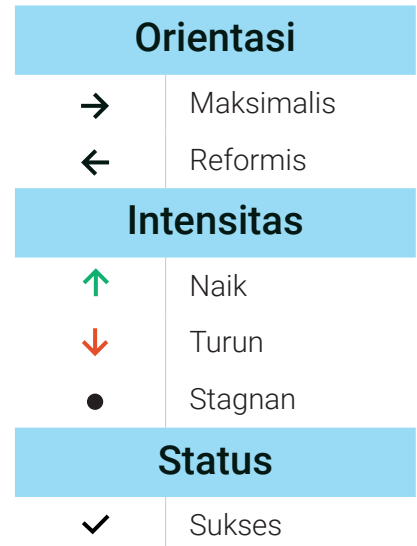
50 Crisis24, “*Madagascar: Further protests, clashes likely nationwide ahead of and during presidential election*,” 13 November 2023.

51 Vanessa Gera, “*Hundreds of thousands march in Poland anti-government protests to show support for democracy*,” Associated Press, 5 Juni 2023.

	2020	2021	2022	2023
Afghanistan		→	●←	●←
Afrika Selatan				→
Albania			→	✓
Aljazair	→	↑→	↓→	
Bangladesh				→
Belarusia	→	↓→	↓→	
Bulgaria	→	✓		
Chili	→	✓		
China			→	✓
Ekuador			→	✓
El Salvador		→		
Ghana				→
Guatemala		→	↑→	✓+←
Hong Kong	→	↓→	↓→	
Iran			→	↓→
Kolumbia	→	↑→	✓	
Kyrgyzstan	→			
Lebanon	→	↑→		
Madagascar				→
Malawi	→			
Myanmar		→	↓→	↑→
Panama			→	●←
Peru	→			→
Polandia				→
Rusia		→	●←	●←
Sri Lanka			→	✓
Sudan	→	↑→	↑→	↓→
Suriah				→
Thailand	→	↓→	↓→	↑→
Tunisia			→	●→

Diagram 1

Perkembangan gerakan maksimalis di dunia (2020-2023)



Kemenangan dan Pembelajaran

Secara ringkas, tahun 2023 diwarnai berlanjutnya, menurunnya, atau bangkitnya perlawanan-perlawanan lama, serta munculnya perlawanan-perlawanan baru. Di tengah keragaman corak dan trayektori mereka, ada beberapa hal yang dapat digarispawahi.

Sepanjang tahun 2023, beberapa gerakan maksimalis muncul dan memperkuat diri di tengah gencarnya kemunduran demokrasi. Di Guatemala, Peru, dan Polandia, tuntutan tidak hanya mencakup pelengseran rezim yang dinilai tidak kompeten, namun juga perlindungan

prinsip-prinsip demokrasi selama masa transisi dan di bawah sistem pemerintahan yang baru. Pada titik ini, menarik untuk membandingkannya dengan perlawanan-perlawanan di berbagai belahan dunia lain yang saat ini (hanya?) bersifat reformis atau melawan elemen sayap kanan yang ingin mencederai demokrasi sebuah negara. Protes di Spanyol seputar Undang-Undang Amnesti Separatis Catalan dan demonstrasi menentang partai sayap kanan di Kolombia, misalnya, bisa saja melahirkan perlawanan sipil berorientasi maksimalis di masa mendatang.

Perihal kemampuan beradaptasi, pada tahun 2023, sejumlah perlawanan sipil mampu mempertahankan kehadiran mereka dengan menggeser orientasi dari maksimalis ke reformis – di mana mereka mengurai tujuan besar mereka menjadi pencapaian-pencapaian kecil. Misalnya, di bawah represi besar-besaran, pilihan yang diambil gerakan di Afghanistan untuk menggarisbawahi tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak menjadi pintu masuk yang menarik perhatian Dewan Keamanan PBB terhadap sifat otoriter pemerintah Taliban. Di Rusia, perlawanan sipil berhasil meyakinkan banyak warga agar menarik dukungan dari pemerintahan otoriter Putin dengan menyoroti berbagai kerugian akibat perang Rusia-Ukraina usulan Putin. Sementara itu, keputusan gerakan di Panama untuk menutup operasi pertambangan Cobre Panamá milik pemerintah berhasil mendorong pengunduran diri Menteri Perdagangan dan Industri, yang kemudian memberikan momentum dan daya tawar lebih besar bagi gerakan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Oleh karena itu, terjadinya pergeseran tujuan tidak serta merta berarti bahwa sebuah gerakan telah meninggalkan tujuan maksimalisnya secara mutlak; hal ini justru menunjukkan fleksibilitas sebuah gerakan dalam menyesuaikan strategi dan taktik mereka dengan kondisi politik tertentu.

Selain itu, faktor-faktor lain yang memungkinkan sebuah gerakan mencapai tahapan kesuksesan meliputi: (1) luasnya repertoar dan sejarah perlawanan nirkekerasan (misalnya semangat dan pengalaman *Arab Spring* yang ditemukan dalam gerakan perlawanan Tunisia dan Suriah) serta (2) kehadiran beragam elemen masyarakat sipil yang mampu mengajak lebih banyak orang untuk bergabung dalam perlawanan (misalnya masyarakat adat, pemuda, dan kelas pekerja di perlawanan Guatemala dan Peru). Pada saat refleksi ini ditulis, faktor-faktor tersebut berhasil mendorong pelantikan Bernardo Arévalo sebagai presiden Guatemala, yang kemudian menandai gerakan di negara tersebut sebagai “salah satu gerakan pro-demokrasi paling sukses di abad ke-21”.⁵²

Terakhir, tahun 2023 menyaksikan bangkitnya perlawanan nirkekerasan yang sempat padam atau sebelumnya dibayangi perlawanan bersenjata. Hal ini merupakan sebuah kemenangan tersendiri, di mana kegigihan warga menunjukkan betapa relevannya disiplin nirkekerasan dari dulu sampai sekarang. Sebagai masyarakat sipil, hal yang kemudian harus dilakukan adalah memperkuat infrastruktur perlawanan guna melampaui gerakan bersenjata, serta jitu beradu dengan pihak-pihak berkuasa untuk mencapai tujuan akhir kita.

⁵² Quico Toro, “*Guatemala Just Ran January 6th In Reverse*,” Persuasion, 17 Januari 2024.



Arah Langkah Eskalasi Perjuangan Keadilan Iklim

Daniel Petz

The heat is on. Secara sah dan meyakinkan, 2023 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah, di mana suhu pada Juli 2023 adalah yang tertinggi dalam 120.000 tahun terakhir.¹ Kemunculan El Nino di tengah perubahan iklim akibat gas rumah kaca yang dihasilkan manusia membuat kondisinya semakin tak menentu. Suhu bumi pada September 2023 lebih tinggi 1,44 derajat Celcius dibandingkan rata-rata suhu bumi di bulan yang sama sepanjang abad ke-20, yang artinya sudah sangat mendekati ambang batas 1,5 derajat Celcius yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.² 2023 menjadi saksi berbagai bencana iklim, dari kebakaran spontan di Kanada yang hingga bulan Agustus sudah menghabiskan area hutan yang lebih luas daripada Inggris,³ hingga rekor gelombang panas yang melanda Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, dan Timur Tengah, hingga curah hujan dan badai ekstrem yang memporandakan Yunani, Hong Kong, dan Libya.⁴ Hampir setiap hari terdapat berita mengenai bencana yang berkaitan dengan iklim, termasuk kekeringan, badai, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Volume lautan es di kedua kutub bumi pun sudah mencapai titik terendah.⁵ Para ilmuwan iklim menggarisbawahi aneka *climate tipping points* (titik balik iklim, titik di mana jika kerusakan sudah melampauinya, tidak ada harapan untuk dapat memperbaikinya seperti sedia kala), seperti sirkulasi air utara-selatan melalui Samudera Atlantik (Atlantic Meridional Overturning Circulation) yang melemah dan menuju kolaps, hutan hujan Amazon yang menjelang ajal (*dieback*), pemutihan karang, robohnya dinding es di kutub, dan sebagainya.⁶ Hampir semua negara di dunia setuju membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya menekan kenaikan tersebut hingga 1,5 derajat Celcius saja.⁷ Sayangnya, komitmen dan kebijakan yang ada tidaklah cukup, dan bahkan, menurut Climate Action Tracker, mengarah pada pemanasan sebesar 2,7 derajat Celcius. Walaupun semua negara memenuhi janji yang dituangkan sendiri dalam Nationally Determined Contributions, masih akan terjadi pemanasan sebesar 2,4 derajat Celcius.⁸ Selain penderitaan milyaran manusia, terutama di Global South, kegagalan menangani krisis iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi hingga 178 triliun dollar Amerika Serikat dalam 50 tahun ke depan, menurut sebuah studi dari Deloitte.⁹

1 Scientific America, "[July 2023 Is Hottest Month Ever Recorded on Earth](#)," 27 Juli 2023.

2 NOAA, "[Topping the charts: September 2023 was Earth's warmest September in 174-year record](#)," 13 Oktober 2023.

3 Al Jazeera, "[Mapping the scale of Canada's record wildfires](#)," 23 Agustus 2023.

4 Jessie Yeung, "[Ten countries and territories saw severe flooding in just 12 days. Is this the future of climate change?](#)" CNN, 17 September 2023.

5 NOAA, "[Topping the charts: September 2023 was Earth's warmest September in 174-year record](#)," 13 Oktober 2023.

6 David I. Armstrong McKay et al., "[Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points](#)," *Science* 377, no. 6611 (September 2022).

7 UNFCCC, "[What is the Paris Agreement?](#)" 2023.

8 Climate Action Tracker, "[2100 warming projections](#)," 16 Oktober 2023.

9 Deloitte, "[Deloitte research reveals inaction on climate change could cost the world's economy US\\$178 trillion by 2070](#)," 23 Mei 2022.

Intinya, situasi sudah sangat genting dan hanya akan menjadi semakin genting setiap tahunnya, kecuali umat manusia berhenti menghasilkan emisi karbon dan berhasil menstabilkan suhu global. Pada titik itu pun, akan ada banyak dampak iklim yang masih harus ditangani hingga berabad-abad berikutnya, seperti kenaikan permukaan air laut.¹⁰

Sejak awal terdeteksinya perubahan iklim, organisasi masyarakat sipil giat mendorong pemerintah, organisasi internasional, perusahaan, dan individu agar memandang ini sebagai ancaman serius, lalu mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan guna meminimalkan risiko dan dampaknya. Dalam dekade terakhir, muncul aneka gerakan iklim global yang diusung oleh kelompok-kelompok yang beragam, yang memanfaatkan metode-metode aksi nirkekerasan secara beragam pula. Sadar akan derajat kegentingan yang ada, banyak dari mereka memilih taktik-taktik baru yang mengeskalasi perjuangan keadilan iklim. Berpijak pada kerangka yang dikembangkan oleh Sorensen dan Johansen mengenai eskalasi aksi nirkekerasan, tulisan ini mendiskusikan eskalasi perjuangan keadilan iklim. Dimulai dengan pembahasan mengenai apa itu eskalasi, dan dilanjutkan dengan perkembangan gerakan keadilan iklim dalam hal kuantitas, metode, *dilemma action*, provokasi, dan kegigihannya, tulisan ini ditutup dengan gambaran mengenai arah gerakan keadilan iklim ke depannya.

Eskalasi dan Aksi Nirkekerasan

Sudah bukan jamannya lagi bicara soal perubahan iklim hanya dari aspek-aspek meteorologi dan geofisika. Di tengah statusnya yang meningkat menjadi “krisis iklim,” penting membicarakannya dengan kerangka konflik multitingkat dan mutidimensi. Perubahan iklim berpeluang mendorong konflik di tingkat komunitas, misalnya seputar sumber energi bersih apa yang harus dipilih oleh warga atau apakah bentuk adaptasi iklim yang paling tepat adalah dengan pengadaan tembok laut (*sea wall*). Ia juga dapat muncul sebagai konflik antarwilayah, misalnya tentang bagaimana jatah emisi nasional didistribusikan antar propinsi dan kota. Ia juga dapat menjadi konflik nasional, misalnya tentang seberapa ambisius negara perlu mengambil kebijakan guna beralih dari industri bahan bakar fosil. Ia juga dapat dilihat sebagai konflik internasional, misalnya mengenai pembagian komitmen iklim antar negara. Ia juga dapat didekati sebagai konflik global, antara negara-negara emitor tinggi di Global North dengan negara-negara paling terdampak di Global South. Ia juga dapat dipahami sebagai konflik lintas generasi, antara generasi muda beserta generasi akan datang yang tersakiti oleh perubahan iklim, berhadapan dengan generasi-generasi sebelumnya yang telah diuntungkan oleh energi bahan bakar fosil. Ia juga dapat dibingkai sebagai konflik berbasis gender, mengingat krisis iklim membawa dampak yang lebih parah untuk perempuan. Tidak terbatas di sini, perubahan dan krisis iklim telah menjelma sebagai konflik sosial di berbagai tingkatan dan dimensi.

¹⁰ Untuk mengetahui gambaran rinci tentang status terkini penelitian iklim, silakan lihat laporan IPCC terbaru di <https://www.ipcc.ch/reports/>

Berpijak pada cara pandang di atas, penting “meminjam” beberapa pemikiran dari Studi Konflik dan Studi Perdamaian. Menurut Studi Konflik, konflik adalah hal yang lumrah. Dengan kata lain, selama manusia masih hidup bersama, konflik akan selalu ada. Konflik berpeluang menjadi negatif jika mengandung dan/atau berujung pada kekerasan. Pada titik ini, penting mengelola konflik secara nirkekerasan, sehingga berbuah positif. Selaras dengan itu, Studi Perdamaian menekankan bahwa pengelolaan dan transformasi konflik dapat mengurangi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural, sehingga berkontribusi terhadap perdamaian positif.¹¹ Artinya, demi tujuan-tujuan keadilan sosial, baik Studi Konflik maupun Studi Perdamaian merekomendasikan mengeskalasi konflik, secara nirkekerasan.

Apa itu eskalasi? Secara umum, Louis Kriesberg and Bruce W. Dayton berpandangan bahwa eskalasi konflik dapat terjadi pada dua dimensi, yaitu intensitas konfliknya dan jumlah aktornya – di mana eskalasi dapat terjadi secara kekerasan maupun nirkekerasan.¹² Menurut mereka, eskalasi konflik secara nirkekerasan dapat menjadi konstruktif karena membuka kesempatan menangani ketidakadilan sosial yang sebelumnya tersembunyi.

Secara khusus, Majken Jul Sørensen dan Jørgen Johansen membedakan lima jenis eskalasi.¹³ Jenis pertama mengeskalasi konfliknya secara kuantitatif, yaitu dengan menambah jumlah aktivis, memperpanjang durasi aksi, memperluas cakupan aksi, dan sebagainya. Jenis kedua, ketiga, keempat dan kelima mengeskalasi konfliknya secara kualitatif, yaitu dengan memilih metode perlawanan baru, menimpakan *dilemma action* yang lebih pas untuk lawan, menciptakan provokasi, dan mempertahankan kegigihan.¹⁴

Eskalasi Gerakan Keadilan Iklim

Apa yang dimaksud dengan gerakan keadilan iklim? Di satu sisi, perlu batasan yang fleksibel mengingat keterkaitan isu ini dengan isu-isu lingkungan, agraria, industri, gender, demokrasi, dan lainnya. Di sisi lain, perlu batasan yang jelas sehingga tidak semua gerakan masuk ke dalam kategori ini, dan akibatnya mengaburkan analisis.

Gerakan keadilan iklim mungkin lebih tepat digambarkan sebagai koalisi yang luas dan longgar antara aneka organisasi, komunitas, dan individu, terutama di kalangan masyarakat sipil, yang mendorong mitigasi perubahan iklim, mendorong adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memastikan keadilan prosedural dalam mendorong mitigasi dan adaptasi tersebut. Kerja-kerja mitigasi antara lain mencakup pengurangan cepat emisi hingga mendekati nol atau bahkan negatif, peralihan ke energi bersih terbarukan, perubahan sistem pengelolaan pertanian, limbah, transportasi, pola makan, dan sebagainya. Adapun adaptasi mencakup kegiatan-kegiatan melindungi dan mendukung mereka yang terdampak perubahan iklim. Di sini,

11 Berdasarkan penjelasan Johan Galtung, perdamaian dapat dikategorikan sebagai perdamaian negatif (tidak adanya kekerasan langsung seperti perang) atau perdamaian positif (keadilan sosial). Lihat: Johan Galtung, “*Violence, Peace, and Peace Research*,” *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 167-191.1.

12 Louis Kriesberg dan Bruce W. Dayton, *Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution* (Rowman & Littlefield, 2012), 143ff.

13 Majken Jul Sørensen dan Jørgen Johansen, “*Nonviolent Conflict Escalation*,” *Conflict Research Quarterly* 34, no. 1 (2016): 7.

14 Majken Jul Sørensen dan Jørgen Johansen, “*Nonviolent Conflict Escalation*,” *Conflict Research Quarterly* 34, no. 1 (2016): 9.

keadilan prosedural dibutuhkan di berbagai aspek mitigasi dan adaptasi supaya manfaat dan bebannya dipikul secara adil, serta supaya semua dapat ikut bersuara seputar bagaimana memastikan keadilan tersebut.

Berpegang pada gambaran di atas, jelas bahwa tujuan dan cakupan antara aktor dalam gerakan keadilan iklim sangat beragam. Ada yang sifatnya cenderung reformis dan teknis seperti penerapan teknologi baru dalam mitigasi dan adaptasi iklim, ada yang sifatnya lebih transformatif dan sistemik seperti mendorong *degrowth* atau bahkan mengakhiri kapitalisme dan neoliberalisme. Ada yang orientasinya spesifik guna memblokir proyek tertentu – sering juga disebut Blockadia oleh Naomi Klein – seperti Ende Gelände di Jerman guna menghentikan penambangan batu bara serta aksi masyarakat adat menyetop pembangunan pipa gas atau penebangan hutan di wilayah mereka, ada yang orientasinya luas seperti Greenpeace, Fridays for Future, dan Extinction Rebellion yang beroperasi di berbagai negara.

Penting diingat bahwa organisasi-organisasi lingkungan hidup telah gencar mengadvokasikan keadilan iklim sejak beberapa dekade lalu, terutama sejak Konferensi Iklim Berlin 1995. Akan tetapi, harus diakui bahwa mobilisasi di bidang keadilan iklim baru terasa pada tahun 2000-an, yaitu menjelang Konferensi Iklim Kopenhagen 2009, di mana lebih dari 100 ribu orang mengikuti demonstrasi. De Moore dkk. menyoroti bagaimana pertumbuhan gerakan iklim saat itu tidak dapat dilepaskan dari tiga hal, yaitu adanya basis sains yang kuat mengenai iklim (dan tersebar luas antara lain melalui film “An Inconvenient Truth” karya Al Gore pada tahun 2006), adanya *climatization* atau pengarusutamaan lensa iklim dalam aneka gerakan sosial, serta adanya *spillover* dari gerakan keadilan sosial global.¹⁵ Kemunculan organisasi-organisasi baru pun, misalnya 350.org pada tahun 2008, memperkuat gerak langkah mereka yang sudah mapan seperti Greenpeace. Lebih jauh, Perjanjian Paris 2015 yang diratifikasi hampir semua negara memberi alat advokasi baru, di mana gerakan-gerakan yang ada memiliki pijakan yang lebih kokoh dalam menuntut pemerintah mereka memenuhi komitmen iklim.

Di tengah emisi global terus meningkat, tahun 2018 menjadi tahun yang sangat penting bagi gerakan iklim. Pada bulan Agustus 2018, aksi mogok sekolah untuk iklim dilakukan oleh Greta Thunberg, dan mengawali apa yang kemudian menjadi gerakan Fridays for Future (FFF). Hampir di waktu yang bersamaan, 31 Oktober 2018, Extinction Rebellion (XR) mendeklarasikan “pemberontakannya” melawan pemerintah Inggris.¹⁶ Dengan daya tarik masing-masing, FFF dan XR berhasil dengan cepat memobilisasi massa di bulan September tahun berikutnya, menyambut Konferensi Iklim 2019 Warsawa, yang waktu itu merupakan mobilisasi gerakan iklim terbesar dalam sejarah. Sekitar 7 juta orang bergabung dalam demonstrasi dan aksi mogok yang dilakukan di sekitar 150 negara. Meskipun FFF memobilisasi massa dalam jumlah lebih besar, XR lebih sering menjadi berita utama mengingat pilihan-pilihan metodenya yang inovatif, yang sebagian besar masuk dalam kategori intervensi.

15 Michiel De Vydt, Katrin Uba dan Mattias Wahlstorm, “*New kids on the block: taking stock of the recent cycle of climate activism*,” *Social Movement Studies* 20, no. 5 (Oktober 2020): 620.

16 Michiel De Vydt, Katrin Uba dan Mattias Wahlstorm, “*New kids on the block: taking stock of the recent cycle of climate activism*,” *Social Movement Studies* 20, no. 5 (Oktober 2020): 621.

Tepat ketika gerakan keadilan iklim mulai menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, pandemi Covid-19 melanda. Dengan pertimbangan kesehatan dan keselamatan publik, aneka gerakan keadilan iklim memutuskan mematuhi berbagai pembatasan sosial era pandemi, dan akibatnya laju mereka cenderung melambat. Di sisi lain, melihat bagaimana negara-negara dapat dengan mudah mengumpulkan aneka sumber daya guna mengelola situasi krisis kesehatan, para aktivis keadilan iklim tambah teryakinkan bahwa, jika mau, negara-negara pun dapat mengelola krisis iklim secara cepat dan bijak. Begitu aneka pembatasan masa pandemi berakhir, gerakan-gerakan keadilan iklim pun dengan segera tancap gas. Belajar dari pengalaman, mereka sadar bahwa mobilisasi massa “biasa” seperti demonstrasi tidaklah cukup. Organisasi seperti Last Generation dan Just Stop Oil pun bermunculan, dengan metode-metode nirkekerasan kategori intervensi. Muncul pula buku Andreas Malm “How to Blow Up a Pipeline” (Bagaimana Meledakkan Saluran Pipa), yang menyerukan beralih ke taktik-taktik yang lebih radikal.¹⁷ Eskalasi ini mengundang respons yang lebih represif dari pemerintah beberapa negara, khususnya di Inggris dan Australia, di mana undang-undang baru atau interpretasi baru terhadap undang-undang lama digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis iklim. Di banyak negara, partai-partai konservatif dan sayap kanan makin gencar menyerukan hukuman yang lebih berat bagi aktivis iklim.

Secara umum, jelas terjadi eskalasi perjuangan keadilan iklim. Pertanyaannya, pada aspek-aspek apa saja eskalasi tersebut terjadi?

Kuantitas. Dari segi kuantitatif, eskalasi gerakan keadilan iklim terjadi di beberapa lini. Yang utama dan yang paling terlihat adalah peningkatan pesat jumlah aktivis. Strategi mogok sekolah yang tadinya hanya dilakukan oleh satu orang remaja di Swedia berujung pada terbentuknya FFF di tingkat global, dengan lebih dari 14 juta pemogok.¹⁸ Lebih dari sekadar memobilisasi generasi muda Global North, gerakan ini diadopsi pula oleh anak muda di Global South. Bahkan, strategi mereka diemulasi oleh segmen-segmen masyarakat lain seperti Grannies for Future (beranggotakan para nenek), Scientists for Future (beranggotakan para ilmuwan), dan sebagainya.

Hal lain yang meningkat adalah jumlah aksi yang dilancarkan. Seusai masa pandemi, para aktivis terhitung lebih sering melakukan aksi. Hampir setiap hari, aksi dari FFF, XR, Last Generation, dan Just Stop Oil di berbagai negara masuk dalam pemberitaan media, dan karenanya meningkatkan pula pemahaman publik terhadap krisis iklim sebagai isu bersama.

Metode. Dalam hal eskalasi metode, Sorensen dan Johansen cenderung fokus pada kemunculan inovasi baru. Padahal, ada setidaknya dua dimensi lagi yang dapat dicermati. Yang pertama adalah eskalasi yang dilakukan dengan mengubah metode perlawanan, dari yang intensitasnya rendah ke yang intensitasnya lebih tinggi. Terkadang, aktivis mulai bergerak menggunakan metode-metode protes dan persuasi. Ketika tidak ada kemajuan berarti, barulah mereka berganti ke metode-metode nonkooperasi dan intervensi. Terkadang pula, aktivis

¹⁷ Andreas Malm, *How to Blow Up a Pipeline: Learning to Fight in a World on Fire* (Verso Books, 2021).

¹⁸ Fridays for Future, *Who We Are*, 2024.

memulai dari taktik-taktik yang legal, lalu beralih ke yang mengandung unsur pelanggaran hukum, dan sering dipandang sebagai pembangkangan sipil. Cara-cara seperti ini mengandung risiko lebih tinggi dan represif, dan karenanya dianggap mampu menarik perhatian lawan dan publik secara mendalam. Yang kedua adalah eskalasi yang dilakukan dengan memperkuat metode-metode intervensi dengan mengikutsertakan metode-metode dari dua kategori lainnya. Penting diingat bahwa aktivis lingkungan telah sejak lama menggunakan metode-metode intervensi,¹⁹ dan karenanya penting menelaah bagaimana penggunaannya makin intensif dari waktu ke waktu.

Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, bisa jadi, inovasi terpenting seputar metode yang digunakan dalam gerakan iklim adalah mogok sekolah. Masuk dalam kategori nonkooperasi, aksi ini menonjol di tengah aneka aksi yang sebagian besar ada dalam kategori protes dan persuasi. Bagaimanapun, yang lebih banyak menghiasi pemberitaan media adalah aksi-aksi yang disruptif, yang masuk dalam kategori intervensi.

Selama beberapa tahun terakhir, gerakan keadilan iklim semakin gencar melakukan disrupti fisik, disrupti kegiatan, dan disrupti psikologis. Secara fisik, aktivis XR, Last Generation, Just Stop Oil, dan lainnya secara sistematis memblokir jalan raya, jembatan, sarana transportasi bahan bakar fosil, pabrik, hutan, dan lainnya. Biasanya, ini dilakukan dengan metode “pasang badan” sembari merantai, mengunci, atau menempelkan diri pada pagar, jalan raya, atau lainnya, sehingga aparat keamanan kesulitan memindahkan tubuh para aktivis. Terkadang, blokir dilakukan dengan cara-cara lebih kreatif dan jenaka, misalnya para aktivis di Inggris dan Amerika Serikat yang berjalan sangat lambat hingga menghambat lalu lintas, sekelompok lansia Third Act yang memarkir dan menduduki kursi roda mereka sedemikian rupa sehingga menghalangi akses masuk bank-bank besar pro industri bahan bakar fosil,²⁰ atau warga Belanda yang bersepeda di landasan pacu supaya jet pribadi tidak dapat lepas landas dari bandara Schiphol.²¹

Selain secara fisik mendisrupsi fungsi aneka infrastruktur, para aktivis dengan jitu mendisrupsi aneka ajang besar, terutama yang dilakukan oleh industri bahan bakar fosil dan sponsor mereka. Misalnya, pada tanggal 23 Mei 2023, 100 aktivis menyerbu pertemuan pemegang saham tahunan konglomerat energi Inggris di London. Mereka memaksa naik ke atas panggung, hingga petugas keamanan terpaksa membuat pagar betis guna melindungi para pemimpin perusahaan dan acara pun terganggu selama hampir dua jam.²² Di minggu yang sama di Paris, mereka membentuk rantai manusia mengitari gedung pertemuan. Aksi serupa terjadi pula di berbagai negara Global South, termasuk yang dilancarkan Greenpeace Indonesia pada rapat pemegang saham Adaro Energy di Jakarta, di bulan yang sama.²³ Setelah sebelumnya meramaikan ajang-ajang *fashion week* di berbagai kota besar, disrupti semacam ini se-

19 Pangkalan data DPD menunjukkan bahwa metode intervensi nirkekerasan lebih sering digunakan dalam konflik lingkungan dan lahan di Indonesia.

20 Claire Elise Thompson, “*Why older Americans are taking to the streets for climate action*,” Gist, 12 April 2023.

21 Fadeke Banjo, “*6 of the Most Creative & Powerful Climate Change Protests Around COP27*,” Global Citizen, 22 November 2022.

22 SRM, “*From suing to sabotage: Protest risks to the fossil fuels industry*,” 6 Juli 2023.

23 Greenpeace Indonesia, *Twitter*, 11 Mei 2023.

makin banyak ditemukan pula di ajang-ajang olah raga internasional, seperti kejuaraan tennis Wimbledon dan US Open, marathon Berlin, kejuaraan dunia *snooker*, serta pertandingan rutin liga sepak bola dan *rugby*.²⁴

Melihat bagaimana kehidupan sehari-hari masih berjalan seperti *business as usual*, tanpa nuansa kegentingan krisis iklim, tidak sedikit aktivis yang merasa perlu melakukan disrupsi di ranah psikologis. Metode yang umumnya dipakai adalah dengan “mewarnai” properti tertentu, dari melempari lukisan-lukisan terkenal dengan cat, sup, dan bahan-bahan lainnya, hingga menyemprotkan warna oranye pada Gerbang Brandenburg, serta menyemprotkan cat pada kapal-kapal pesiar dan jet-jet pribadi di beberapa negara.²⁵ Lebih jauh, beberapa aktivis yang melancarkan disrupsi psikologis menggunakan pula metode-metode yang, pada titik tertentu, melibatkan sabotase. Di Eropa, aktivis mengempiskan ban mobil-mobil SUV (emisi tinggi, lebih cocok untuk medan terjal dan perjalanan jarak jauh) yang dipakai berkendara di dalam kota.²⁶ Di Jerman dan Prancis, aktivis menanami lapangan golf dengan pohon dan mengisi lubang golf dengan beton, guna menggarisbawahi betapa tidak masuk akal nya menghabiskan air di tengah rekor gelombang panas musim panas lalu di Eropa, hanya demi memastikan keberlangsungan lapangan dan kegiatan golf.²⁷ Di Prancis, atlet *parkour* memanjat gedung dan mematikan lampu guna menghentikan polusi cahaya dan pemborosan energi.²⁸ Di beberapa negara, tercatat peningkatan kasus sabotase, khususnya terhadap saluran pipa migas.²⁹ Aneka tindakan di atas mengundang reaksi negatif terhadap aktivisme iklim. Salah satu yang paling berat adalah pelarangan terhadap Les Soulèvements de la Terre, sebuah organisasi iklim di Prancis dengan 110.000 anggota, menyusul bentrok dengan kepolisian dan tuduhan pengrusakan properti dalam unjuk rasa di Sainte-Soline dan lokasi lainnya.³⁰

Metode lain yang semakin sering digunakan aktivis keadilan iklim guna memunculkan disrupsi psikologis adalah mogok makan. Pada tahun 2021, para aktivis melakukan mogok makan di depan Gedung Putih mendesak aksi iklim yang lebih kuat dari pemerintahan Biden.³¹ Menggunakan metode mogok makan, para aktivis Last Generation di Jerman berhasil memaksakan pertemuan dengan kanselir Scholz di awal tahun 2023, di hari ke-27 aksi tersebut.³²

Dilemma actions. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan aksi nirkekerasan tergantung pada bagaimana aktivis menimpakan *dilemma action* kepada lawan. Di sin, lawan ditempatkan pada posisi di mana ia harus tunduk pada tuntutan aktivis, atau menanggung ongkos moral,

24 Damien Gayle, “Disruptive protest helps rather than hinders activists’ cause, experts say,” *The Guardian*, 7 Juli 2023.

25 David Brunat, “Climate activists target jets, yachts and golf in a string of global protests against luxury,” *Associated Press*, 28 Agustus 2023; *Associated Press*, “Climate activists spray Berlin’s Brandenburg Gate with orange paint,” 18 September 2023.

26 *Associated Press*, “Climate activists deflate tires of more than 100 SUVs in Denmark’s capital,” 7 Juni 2023.

27 *Associated Press*, “Climate activists deflate tires of more than 100 SUVs in Denmark’s capital,” 7 Juni 2023.

28 Fadeke Banjo, “6 of the Most Creative & Powerful Climate Change Protests Around COP27,” *Global Citizen*, 22 November 2022.

29 Jack McGovan, “Is breaking things the best way forward for climate activists?,” *openDemocracy*, 13 Oktober 2022.

30 Rémi Barroux dan Audrey Garric, “Environmental activists increasingly tempted to act by sabotage,” *Le Monde*, 5 Mei 2023; Joseph Ataman dan Laura Paddison, “French government shuts down a climate group after protests turn violent,” *CNN*, 21 Juni 2023.

31 Rachel Ramirez dan Elle Nilsen, “Tired but determined, 5 young activists continue their hunger strike outside the White House,” *CNN*, 26 Oktober 2021.

32 Jeffrey A. Brown, “The Last Generation’s Climate Rebellion,” *Noema*, 11 Juli 2023.

sosial, politik, dan ekonomi jika meneruskan langkahnya selama ini.³³ Dalam kasus mogok sekolah misalnya, Greta Thunberg menempatkan pemerintah pada dilema menghukum para siswa yang setiap Jumat memutuskan “membolos” sekolah, atau membiarkan mereka terus mengampanyekan keadilan iklim.

Aneka metode disrupsi dalam perjuangan keadilan iklim tampak semakin lihai memastikan *dilemma actions*. Para aktivis “Blockadia” melakukannya dengan mengedepankan narasi kegentingan krisis iklim, yang selanjutnya menjustifikasi aksi-aksi blokade mereka dan menyulitkan siapapun yang ingin membubarkannya. Mereka yang mengandalkan pembangkangan sipil melakukannya dengan menyiratkan betapa penangkapan terhadap aksi menyemprot cat, menghentikan lalu lintas, dan sebagainya, justru berpotensi menggiring opini publik ke arah pro-aktivis keadilan iklim. Sejauh ini, aneka disrupsi yang ditujukan kepada industri bahan bakar fosil cenderung lebih jitu menimpakan *dilemma action* dibandingkan yang ditujukan kepada publik secara luas.

Provokasi. Ada dua aspek penting dalam provokasi, yaitu aksi yang dilancarkan dan reaksi yang muncul. Tanpa reaksi yang (setidaknya) setara dengan intensitas aksi, provokasi dapat dianggap gagal. Di antara yang paling provokatif adalah aksi melempar sup ke lukisan Van Gogh di National Gallery di London pada Oktober 2022, yang kemudian direplikasi di beberapa negara lain.³⁴ Meski lukisan-lukisan yang “dilempari” terlindungi kaca dan karenanya tidak ada kerusakan sama sekali, aksi tersebut mengundang reaksi sangat keras di media massa dan media sosial. Ini membuahkan kesempatan bagi para aktivis mengajukan provokasi lebih jauh, dengan pertanyaan “Mana yang lebih berharga buatmu, lukisan atau kehidupan (yang terancam punah oleh krisis iklim)?” serta pernyataan “Kalau kamu marah karena ada yang menurutmu sedang merusak lukisan, kamu seharusnya lebih marah karena ada yang nyata-nyata merusak bumi dan kehidupan.” Reaksi kuat lain muncul setelah disrupsi infrastruktur publik dan ajang-ajang olahraga, yang terkadang berujung pada serangan fisik oleh warga terhadap aktivis.³⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, provokasi menjadi elemen penting dalam aksi-aksi yang mengandalkan disrupsi. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa disrupsi penting bagi kesuksesan gerakan, sedangkan beberapa survei menunjukkan bahwa sebagian besar publik terganggu dengan cara-cara disruptif, yang artinya provokasi tidak selalu menguntungkan aktivis.³⁶

Kegigihan. Di tengah represi yang semakin menjadi, gerakan keadilan iklim menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Hingga akhir 2023, mogok sekolah yang digawangi FFF setia berjalan selama 280 minggu. Disrupsi-disrupsi baru terus dilancarkan oleh XR, Last Generation,

33 Srđa Popović et al., *CANVAS Core Curriculum: A Guide to Effective Nonviolent Struggle* (Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies, 2007).

34 Damien Gayle, “*Just Stop Oil activists throw soup at Van Gogh’s Sunflowers*,” The Guardian, 14 Oktober 2022.

35 Lihat, contohnya, AP News, “*Berlin police record jump in angry motorists attacking road-blocking climate activists*,” 2 Juni 2023.

36 Jajak pendapat yang dilakukan oleh YouGov pada bulan Februari 2023 di Inggris menunjukkan bahwa sebagian besar (78%) warga Inggris berpendapat aksi disrupsi menghambat perjuangan para aktivis. Selain itu, di Jerman, 85% responden dalam sebuah survei menganggap blokade jalan tidak dapat dibenarkan. Lihat: Damien Gayle, “*Disruptive protest helps rather than hinders activists’ cause, experts say*,” The Guardian, 7 Juli 2023 dan Von Marcel Kolvenbach et al., “*Deutsche lehnen Straßenblockaden mehrheitlich ab*,” Tagesschau, 26 Juni 2023.

dan Just Stop Oil meski aktivis mereka ditangkapi. Di sini, keputusan XR UK beralih fokus sementara, dari taktik-taktik disrupti infrastruktur publik ke menjalin hubungan bermakna dengan publik pun, dapat dilihat sebagai bentuk kegigihan gerakan tersebut dalam memenangkan keadilan iklim.³⁷

Setelah Eskalasi, Lalu Apa?

Sebagaimana didiskusikan di atas, terdapat dua gelombang eskalasi penting dalam gerakan keadilan iklim. Yang pertama terjadi pada tahun 2018, ditandai dengan kemunculan gerakan-gerakan global baru seperti FFF dan XR. Yang kedua terjadi setelah pembatasan sosial era pandemi berakhir, yaitu sekitar tahun 2022, ditandai makin maraknya penggunaan metode-metode disruptif oleh XR, Last Generation, Just Stop Oil, dan lainnya. Greta Thunberg pun sering ikut dalam aksi-aksi disruptif di atas dan beberapa kali ditangkap aparat – ini menyiratkan penerimaan yang luas di kalangan aktivis keadilan iklim terhadap pentingnya mengeskalasi gerakan.

Eskalasi gerakan keadilan iklim terlihat jelas di kelima dimensi, yaitu kuantitas, metode, *dilemma action*, provokasi, dan kegigihan. Mengingat kegentingan krisis iklim, diperlukan eskalasi lebih jauh, namun secara lebih strategis.

Dari segi kuantitas, kemunculan terus-menerus isu keadilan iklim di media massa dan media sosial telah berhasil meningkatkan secara signifikan jumlah orang yang peduli akan krisis iklim.³⁸ Kendati demikian, masih ada ruang sangat luas mengeskalasi dimensi kuantitas ini. Di Global North, gerakan keadilan iklim masih didominasi perempuan muda kulit putih berpendidikan tinggi. Sebuah studi menunjukkan bahwa di kalangan aktivis keadilan iklim Amerika Serikat, 61% di antaranya perempuan, 93% di antaranya berkulit putih, dan 91% di antaranya berpendidikan sarjana.³⁹ Di sini, langkah memperluas keikutsertaan kelompok BIPOC dan lansia perlu memperhatikan posisi mereka yang lebih rentan terhadap represi. Di Global South, lebih banyak warga dari negara-negara besar dengan emisi tinggi, seperti Brasil, India, Indonesia, dan Afrika Selatan perlu lebih sering berdiri bersama masyarakat adatnya dan warga dari negara-negara kepulauan kecil guna mendorong keadilan iklim. Di seluruh dunia, eskalasi pada dimensi kuantitas perlu dilakukan dengan mengaitkan perjuangan keadilan iklim dengan perjuangan keadilan sosial lainnya, termasuk pada isu perburuhan, antiperang (termasuk Ukraina), antikolonianisme (termasuk Palestina), dan demokrasi – terutama di tengah naiknya beberapa kelompok sayap kanan ke pemerintahan. Tanpa melakukannya, sulit membayangkan bertambahnya jumlah pendukung keadilan iklim dan meningkatnya frekuensi aksi, di tengah isu iklim yang sering dinomorduakan dari perang, pemilihan umum, bencana alam, dan sebagainya.

37 Robert Booth, "*Extinction Rebellion announces move away from disruptive tactics*," The Guardian, 1 Januari 2023.

38 UNDP, "*The People's Climate Vote*," 26 Januari 2021.

39 Dana R. Fisher dan Quinn Renaghan, "*Understanding the growing radical flank of the climate movement as the world burns*," Brookings, 26 Juli 2023.

Dari segi metode, aktivis iklim tampaknya tidak kendur mengandalkan metode-metode nonkooperasi dan metode-metode intervensi, bahkan semakin piawai mengombinasikan satu sama lain, termasuk dengan metode-metode protes dan persuasi. Pada titik tertentu, taktik-taktik mereka berpeluang diterjemahkan sebagai sabotase. Mengembangkan kombinasi dan urutan metode baru memang perlu, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bagaimana metode-metode tersebut dapat menimpakan *dilemma action* yang pas kepada lawan, mendorong provokasi yang produktif, serta memperkuat kegigihan gerakan.

Dari segi *dilemma action*, perlu eskalasi lebih jauh. Meski perhatian yang meningkat dari publik telah menyulitkan industri bahan bakar fosil menjalankan operasi mereka, tidak terjadi perubahan yang secara signifikan memangkas emisi. Boyd dkk.⁴⁰ menekankan pentingnya mengkomunikasikan secara jelas kepada publik logika di balik sebuah aksi. Pada titik tertentu, aksi keadilan iklim dewasa ini seakan menimpakan *dilemma action* yang “setara” kepada industri bahan bakar fosil dan orang-orang superkaya yang diuntungkan olehnya dan kepada warga biasa yang terpaksa tergantung pada infrastruktur publik, seolah semuanya memikul derajat kontribusi yang sama terhadap krisis iklim. Bisa jadi, aktivis perlu memfokuskan *dilemma action* kepada industri bahan bakar fosil, sehingga tidak mengantagonisasi publik. Penangkapan aktivis yang memblokir tambang batu bara yang merusak lingkungan akan lebih mungkin menarik simpati publik daripada penangkapan aktivis yang memblokir jalan raya.

Dari segi provokasi, aksi-aksi disruptif berhasil mengundang reaksi-reaksi kuat, termasuk penerapan dan interpretasi perundangan yang kian represif, yang berujung pada kriminalisasi dan penangkapan masif aktivis keadilan iklim. Meski penangkapan semacam itu berpeluang menjadi bumerang bagi rezim, terlalu dini memprediksi apakah ini akan memunculkan *backfire effect* seperti halnya pada perjuangan kemerdekaan India serta perjuangan anti-perang Vietnam oleh warga Amerika Serikat. Di sini, penting mengelola cap yang disematkan kepada aktivis yang mengandalkan metode-metode disruptif, misalnya sebagai pelaku sabotase (*saboteur*) atau sebagai bagian dari sayap kekerasan (*violent flank*), mengingat wawancara dengan tokoh-tokoh Last Generation dan Just Stop Oil menunjukkan pengetahuan dan komitmen mendalam mereka terhadap nirkekerasan.⁴¹ Juga, aktivis perlu berhati-hati supaya tidak masuk dalam jebakan lawan dan terprovokasi menggunakan cara-cara kekerasan, yang tentunya akan mencederai reputasi gerakan keadilan iklim.

Dari segi kegigihan, gerakan keadilan iklim perlu mengeskalasi kesabarannya. Semua perubahan sosial membutuhkan waktu, apalagi yang skalanya sistemik seperti ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Betul, di tengah aneka *climate tipping points* gerakan keadilan iklim tidak punya banyak waktu. Bagaimanapun, kesabaran tetap dibutuhkan. Eskalasi yang terlalu cepat, terutama melalui disrupsi dan sabotase, berpeluang melumpuhkan gerakan keadilan iklim itu sendiri, mengingat perubahan yang menjadi tujuan gerakan ini sangat tergantung pada

40 Andrew Boyd dan Dave O. Mitchell, *Beautiful Trouble: A Toolbox for Revolution* (OR Books, 2016).

41 Benjamin Wehrmann, “*Greens and Fridays for Future denounce radical climate protests by Last Generation group.*” Clean Energy Wire, 13 April 2023; Tom Foster dan Clare Sebastian, “*Greta Thunberg arrested at oil conference in London, eyewitnesses tell CNN.*” CNN, 17 Oktober 2023.

dukungan publik dan pengambil keputusan untuk mengimplementasikan kebijakan iklim yang ambisius. Akan tetapi, “terlalu sabar” pun membawa risiko tersendiri, yaitu munculnya sayap kekerasan di kalangan aktivis iklim, yang selanjutnya bisa mengarah pada kekecewaan publik dan represi lebih jauh oleh rezim.⁴² Di sini, para aktivis perlu menyeimbangkan risiko kemunculan sayap kekerasan dan risiko kehilangan dukungan publik, sebagian besar dari mereka didera kegelisahan akibat rentetan krisis global di bidang kesehatan, keamanan, dan keuangan.

Beberapa pemikir, seperti Malm, mengutarakan bahwa keberhasilan sebuah gerakan bisa jadi tergantung pada keberadaan sayap kekerasan, seperti misalnya perjuangan pembebasan warga kulit hitam Afrika Selatan.⁴³ Pemikir lainnya, seperti Chenoweth dan Stepan, menekankan bahwa sayap kekerasan akan mengurangi tingkat partisipasi perempuan, lansia, anak, dan kelompok minoritas lain, padahal partisipasi masif adalah faktor penting keberhasilan gerakan.⁴⁴ Di sini, sangat penting bagi gerakan keadilan iklim untuk tidak terjebak dan terprovokasi menggunakan kekerasan. Kreativitas dan humor menjadi penting dalam memperpanjang nafas perjuangan, sembari mengeskalasinya.

42 Erica Chenoweth, *Civil Resistance: What Everyone Needs to Know* (Oxford: Oxford University Press, 2021).

43 Andreas Malm, *How to Blow Up a Pipeline: Learning to Fight in a World on Fire* (Verso Books, 2021).

44 Lihat Erica Chenoweth, “*Questions, Answers, and Some Cautionary Updates Regarding the 3.5% Rule*,” Carr Center Discussion Paper Series, 20 April 2020 dan Erica Chenoweth, *Civil Resistance: What Everyone Needs to Know* (Oxford: Oxford University Press, 2021).



Babak Baru Perlawanan Nirkekerasan Palestina

Kai Peter Stabell

Di tengah dunia yang mendambakan keadilan dan rekonsiliasi, keputusan International Court of Justice (ICJ) di awal 2024 membawa secercah harapan. Capaian di ranah hukum ini tidak dapat dilepaskan dari kesadaran kolektif baru yang menguat di kalangan masyarakat global. Banyak yang mengalami perubahan cara pandang secara drastis, termasuk mereka dari kalangan *evangelist* Amerika Serikat, yang umumnya terjebak dalam narasi sempit dan tunggal mengenai Israel-Palestina.

Ini terlihat, salah satunya, dalam video TikTok seorang perempuan Amerika Serikat. Mengenakan *keffiyeh*, ia menceritakan pemahaman barunya mengenai Palestina. Terpantik peristiwa 7 Oktober 2023, ia mencari tahu, dan menjadi tahu, perjalanan panjang Palestina mencari keadilan, dari 1948, 1967, 2005, hingga 2018, dan seterusnya.¹ Cerita yang melatarbelakangi video ini, maupun ratusan cerita serupa, menunjukkan betapa informasi dan empati memiliki kekuatan transformatif yang luar biasa dalam mendobrak miskonsepsi yang mengakar selama bertahun-tahun.

Menyusul episode-episode kekerasan Israel-Palestina 75 tahun terakhir, terutama pasca 7 Oktober 2023, mudah sekali melupakan betapa perjuangan pembebasan Palestina memiliki sejarah perlawanan nirkekerasan yang kaya dan konsisten, bahkan sejak jaman kolonial Inggris. Sepanjang perjalanan tersebut, diskursus mengenai relevansi dan efektivitas metode nirkekerasan dalam perjuangan pembebasan Palestina selalu berkembang.² Yang penting dalam diskursus ini adalah bahwa nirkekerasan merupakan strategi yang secara sadar dipilih berdasarkan aneka pertimbangan – termasuk kohesi sosial dan peluang keberhasilan – bukan keterpaksaan karena aktivis kekurangan opsi-opsi kekerasan.

Artikel ini mencoba mengangkat perjalanan panjang perlawanan nirkekerasan terhadap pendudukan Israel di Palestina. Tentu, tidak semua aksi nirkekerasan maupun analisis akar persoalan Israel-Palestina dapat dibahas di sini. Dibuka dengan pendekatan Galtung dan pendekatan feminis, tulisan ini memaparkan perlawanan warga Palestina sejak tahun 1930-an hingga akhir 2023, kemunculan solidaritas global, serta tantangan ke depan.

1 Christina Hilton, *TikTok*, 29 Januari 2024.

2 Nizar Mimbles, "*Is Nonviolence Relevant for the Palestinian Struggle?*", Mondoweiss, 28 Februari 2023.

Kasus Israel-Palestina begitu kompleksnya. Artikel ini mencoba mendekatinya dengan berpijak pada segitiga kekerasan Johan Galtung³ dan pendekatan resolusi konflik para feminis. Kombinasi dua lensa ini diyakini mampu menghasilkan analisis yang lebih berkualitas, sekaligus mematahkan paradigma patriarkis yang banyak ditemukan, termasuk dalam kajian-kajian mengenai perdamaian.

Galtung menawarkan kerangka yang *nuanced* dalam membedah konflik. Di lapisan yang paling kasat mata, ada **kekerasan langsung**, yang di antaranya meliputi konfrontasi fisik dan aksi militer. Lapisan ini biasanya paling mengundang perhatian karena memperlihatkan dengan jelas dampak buruk yang dirasakan manusia. Pada titik ini, penting memperhatikan pula lapisan-lapisan konflik yang lebih dalam. Ada **kekerasan struktural**, yang termanifestasikan melalui aturan-aturan yang berujung pada perampasan tanah, pembatasan ruang gerak, dan pengendalian sumber daya. Kebijakan-kebijakan ini secara sistematis mengikis hak dasar dan kebutuhan dasar warga Palestina, membatasi akses mereka terhadap layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Meski tidak kasat mata, aneka kekerasan struktural ini berdampak sangat kuat terhadap keseharian hidup warga Palestina.

Tak kalah penting di sini adalah **kekerasan kultural**, yang meliputi sikap-sikap yang membenarkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan kultural dapat ditemukan dalam narasi-narasi yang mendehumanisasi pihak lawan, interpretasi sejarah yang tidak memuat perspektif pihak-pihak tertentu, serta norma sosial yang melanggengkan ketimpangan dan membenarkan *status quo*. Lapisan ini sangat merasuk ke dalam sentimen kolektif dan ekspresi budaya, membentuk persepsi dan aksi semua pihak dalam konflik⁴

Pendekatan feminis memungkinkan kita memahami pentingnya pengalaman dan kontribusi perempuan, serta kelompok-kelompok minoritas lain, dalam binadamai. Kendatipun dapat menghadirkan pandangan yang lebih holistik, pendekatan feminis seringkali terpinggirkan dalam narasi-narasi tradisional terhadap dinamika konflik.⁵ Dalam kaitannya dengan Palestina, perempuan bukan hanya yang paling terdampak oleh kekerasan langsung dan kekerasan struktural, melainkan juga yang memainkan peran penting dalam gerakan-gerakan nirkekerasan di tapak. Daya tahan dan strategi mereka melampaui kerasnya pendudukan asing dari hari ke hari memberi *insights* mengenai dampak konflik secara lebih luas.⁶ Guna menghadirkan resolusi yang adil dan berkelanjutan terhadap konflik, aneka perspektif feminis menekankan perlunya menangani ketimpangan berbasis gender, yang seringkali diperparah oleh konflik.

3 Johan Galtung, "Cultural Violence", *Journal of Peace Research* 27, no. 3 (1990): 291-305.

4 Luigi Esposito dan Katerina Standish, *Cultural Violence in the Classroom: Peace, Conflict and Education in Israel* (Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015).

5 Tony Jenkins Reardon Betty A., "Gender and Peace: Towards a Gender-Inclusive, Holistic Perspective," in *Handbook of Peace and Conflict Studies*, ed. Charles Webel dan Johan Galtung (Routledge, 2007); Maryam Khalid, "Gender, Orientalism and Representations of the "Other" in the War on Terror," *Global Change, Peace & Security* 23, no. 1 (2011): 15-29.

6 Rita Stephan dan Mounira M. Charrad, *Women Rising: In and Beyond the Arab Spring* (NYU Press, 2020); Tanetta Andersson, "'Knowing' Palestinian Women: Interrogating Western International Feminist Assumptions, Governance, and Social Science Discourses", *Critical Sociology* 49, no. 6 (2023): 1021-36.

Irisan pendekatan Galtung dan para feminis menawarkan narasi yang lebih kaya dan inklusif terhadap Israel-Palestina. Di sini, pengalaman yang beragam serta kontribusi yang penting dari semua pihak, terutama perempuan, menjadi bagian integral narasi tersebut. Ada pemahaman bahwa perdamaian komprehensif dan jangka panjang bergantung pada keberhasilan menangani semua bentuk kekerasan – baik langsung, struktural, dan kultural. Karenanya, sejarah dan perkembangan perlawanan nirkekerasan di Palestina tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya mengenyahkan opresor asing, melainkan juga upaya transformasi dan penguatan masyarakat secara internal.

Rentetan Panjang Pembangkangan Sipil

Sejarah perlawanan nirkekerasan di Palestina memiliki banyak aspek dan sangat berkelindan dengan dinamika persoalan Israel-Palestina secara umum. Meski diwarnai oleh metode yang beragam, yang konsisten ditemukan dari masa ke masa adalah pembangkangan sipil. Di sini, warga dengan sengaja melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum, dan siap masuk penjara karenanya.

1930-an. Sebelum dibentuknya negara Israel pada tahun 1945, warga Palestina sudah melancarkan aneka bentuk perlawanan nirkekerasan. Termasuk di dalamnya adalah petisi, demonstrasi, dan mogok melawan pemerintah kolonial Inggris dan imigrasi Zionis. Pada bulan April 1936, warga Arab dari kalangan buruh, supir, dan penjaga toko menggelar mogok massal (*general strike*).⁷ Dengan dukungan dari keluarga-keluarga berpengaruh, pemimpin agama, dan pemimpin politik, mogok massal ini berlanjut hingga Oktober 1936. Sejak itu, mogok menjadi repertoar yang semakin penting dalam perjuangan pembebasan Palestina. Sepanjang tahun 1938, warga di berbagai kota menggelar aneka mogok guna merespons represi pemerintah kolonial Inggris. Dari mogok empat hari di Safad pada bulan Januari, ke mogok di Hebron pada waktu yang kurang lebih sama, ke mogok makan dua minggu oleh para tahanan di Acre pada bulan April, ke mogok solidaritas di kota-kota lain seperti Haifa, Baysan, Tiberias, dan Nazareth, ke mogok massal di hampir semua kota pada bulan Juli dan Agustus, hingga puncaknya yaitu mogok massal satu setengah bulan sepanjang November dan Desember.⁸ Mogok massal akhir tahun ini dibarengi dengan boikot terhadap sistem kartu tanda pengenal yang diterapkan pemerintah kolonial.

Setelah 1948. Menyusul peristiwa Nakba pada tahun 1948, yang berdampak pada terusirnya ratusan ribu warga Arab Palestina, muncul aneka perlawanan nirkekerasan dengan repertoar yang lebih luas. Termasuk di dalamnya adalah pendirian organisasi-organisasi politik seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), penggunaan aneka ekspresi budaya dan sastra, serta gerakan-gerakan nonkooperasi. Yang tidak boleh dilupakan adalah perlawanan sehari-hari warga sipil dalam mempertahankan atau merebut kembali ruang hidupnya. Misalnya,

⁷ Tuntutan yang diajukan adalah supaya pemerintah kolonial Inggris tidak mendorong imigrasi warga Yahudi, tidak memindahkan kepemilikan tanah warga Arab kepada warga Yahudi, serta segera membentuk pemerintahan nasional.

⁸ Charles W. Anderson, "Other Laboratories: The Great Revolt, Civil Resistance, and the Social History of Palestine," *Journal of Palestine Studies* 50, no. 3 (2021): 47–51.

para perempuan yang terusir dari Desa Umm Al Fahim berjalan kaki kembali ke rumah mereka dan mendudukinya; para petani dan penggembala yang terusir dari Wadi A'ara setia datang kembali setiap harinya guna mengerjakan sawah dan membawa ternak mereka ke desa tersebut; warga menanam pohon zaitun dan almond alih-alih mengikuti instruksi pemerintah militer untuk menanam sayur-mayur; pada perayaan-perayaan yang melibatkan tentara Israel, perempuan menyanyikan lagu-lagu kesedihan dan kemarahan, bukan lagu-lagu riang sebagaimana diperintahkan; seniman menggelar festival puisi guna memperdengarkan larik-larik perlawanan; pesta pernikahan dan perayaan agama diwarnai lagu-lagu nasional dengan dialek lokal sehingga tidak dimengerti artinya oleh tentara pendudukan, dan banyak cerita lainnya.⁹

Intifada Pertama 1987-1993. Fase ini menjadi saksi munculnya perjuangan nirkekerasan yang terkoordinasi di tingkat nasional, dengan dukungan sangat besar dari massa. Meski sering dicitrakan sebagai aksi lempar batu oleh anak-anak muda, Intifada Pertama sebenarnya dipenuhi aksi-aksi pembangkangan sipil masif, termasuk boikot terhadap produk-produk Israel, mengemplang pajak, dan mendirikan sekolah bawah tanah. Dari aneka perlawanan yang dilancarkan, 85% berhasil bertahan dengan disiplin nirkekerasan – 15% lainnya pun hanya diwarnai kekerasan tingkat rendah dan terjadi di tengah represi tentara Israel yang lebih sarat kekerasan.¹⁰

Pasca-Oslo 1993. Meski sebuah perjanjian damai telah tercapai di Oslo pada tahun 1990-an, perlawanan nirkekerasan di Palestina terus berlangsung secara gigih. Aneka gerakan di tingkat tapak, advokasi kebijakan, serta aksi solidaritas internasional membuahkan hasil yang penting meski sering tertutupi oleh berita-berita mengenai konfrontasi kekerasan.¹¹ Salah satu yang menonjol di era ini adalah metode-metode intervensi nirkekerasan yang dilancarkan oleh warga asing di berbagai wilayah Palestina. Difasilitasi oleh International Solidarity Movement (ISM), sebuah lembaga yang didirikan oleh aktivis Palestina, para sukarelawan dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, Italia, Malta, dan negara-negara lain menggunakan tubuh mereka guna mengadakan (*human shield*) pengusuran rumah warga Arab Palestina, mengawal aktivitas warga sipil Palestina supaya tidak diganggu tentara Israel, menerobos jam malam yang ditetapkan rezim militer Israel demi mengantar makanan dan obat-obatan kepada yang membutuhkan, memindahkan blokade yang dipasang oleh tentara Israel, dan sebagainya.¹² Kematian beberapa sukarelawan turut membuka mata dunia akan apa yang terjadi di Palestina, salah satunya melalui penerbitan buku dan pementasan aktivisme Rachel Corrie.¹³

9 Marwan Darweish dan Patricia Sellick, "*Everyday Resistance among Palestinians Living in Israel 1948–1966*," *Journal of Political Power* 10, no. 3 (2017): 353–370.

10 Gene Sharp, "*The Intifadah and Nonviolent Struggle*," *Journal of Palestine Studies* 19, no. 1 (1989): 3–13; Véronique Dudouet, *Civil Resistance and Conflict Transformation: Transitions from Armed to Nonviolent Struggle* (London: Routledge, 2014).

11 Véronique Dudouet, *Civil Resistance and Conflict Transformation: Transitions from Armed to Nonviolent Struggle* (London: Routledge, 2014).

12 Ghassan Andoni, Huwaida Arraf, Nicholas Blincoe, Hussein Khalili, Marissa McLaughlin, Radhika Sainath, dan Josie Sandercock, *Peace Under Fire: Israel, Palestine and the International Solidarity Movement* (Verso: 2004).

13 Rachel Corrie Foundation for Peace & Justice, "*Rachel's Words in Print*," diakses pada 2 Februari 2024; Rory McCarthy, "*Rachel Corrie play debuts in Israel*," *The Guardian*, 15 Maret 2008.

Protes Tingkat Desa 2000-an. Sejak awal tahun 2000-an, desa-desa seperti Bil'in dan Ni'lin muncul sebagai simbol perlawanan nirkekerasan terhadap "sekat pengamanan" yang didirikan oleh pemerintah Israel. Mengambil bentuk yang berbeda-beda, dari tembok beton hingga kawat besi, sekat ini masuk dan memisahkan wilayah-wilayah Palestina. Setiap Jumat sejak Februari 2005, warga Bil'in melakukan *march* dan demonstrasi di seputar sekat tersebut sembari membawa bendera Palestina.¹⁴ Desa Ni'lin mengemulasi repertoar ini pada tahun 2007 menyusul didirikannya sekat serupa di desa mereka. Protes tingkat desa ini menjadi ritual tersendiri yang sering diramaikan oleh aktivis internasional dan terkadang direspons secara kekerasan oleh aparat.¹⁵

Boycott, Divestment, Sanctions (BDS). Dimulai pada tahun 2005, gerakan ini memberi tekanan ekonomi dan politik terhadap Israel dengan menyerukan supaya semua individu dan institusi memboikot, menarik investasi, dan memberi sanksi kepada semua yang berkontribusi pada pendudukan Israel atas Palestina. Konglomerasi seperti Veolia, Orange, dan CRH berhasil dipaksa mengakhiri keterlibatannya dalam aneka operasi Israel yang melanggar HAM warga Palestina; dana asing dari Norwegia, Luxembourg, Belanda, Selandia Baru, dan sebagainya berhasil didivestasi dari Israel atau perusahaan yang mendukung pendudukan Israel atas Palestina; berbagai gereja di Amerika Serikat dan Afrika Selatan berhasil mendivestasi dana sumbangan jemaatnya dari perusahaan dan bank yang mendukung pendudukan Israel atas Palestina; kota Dublin, pada tahun 2018, menjadi kota pertama di Eropa yang secara resmi mengadopsi prinsip BDS; masih banyak lagi keberhasilan BDS dalam menangguk sumber keuangan maupun reputasi pihak-pihak pro-pendudukan.¹⁶ Aneka kesuksesan ini berujung pada tuduhan-tuduhan anti-Semitisme terhadap BDS.

Gaza 2018. Berawal dari unggahan media sosial seorang jurnalis muda tentang tenda yang didirikannya di dekat pagar pembatas yang didirikan pemerintah Israel, muncul narasi mengenai pentingnya warga Palestina kembali ke rumah dan tanah tempat keluarganya tinggal sebelum Nakba. Lahirlah *The Great March of Return*, di mana puluhan ribu warga menggelar *march* dan demonstrasi di dekat perbatasan Gaza-Israel. Yang ditekankan di sini adalah hak pengungsi Palestina untuk pulang serta pengakhiran blokade Israel atas Gaza.¹⁷ Meski tadinya dirancang untuk berjalan selama enam minggu saja, antara *Land Day* di bulan Maret 2018 dan *Nakba Day* di bulan Mei 2018, *The Great March of Return* ini berlangsung hingga Desember 2019.

14 Aden Tedla, "*Palestinians in Bil'in Protest Construction of Israeli Separation Barrier, 2005-2011*," Global Nonviolent Action Database, 10 Agustus 2011.

15 Dale Sprusansky, "*Activist Discusses Nonviolent Protest in Bil'in, West Bank*," *Washington Report on Middle East Affairs* 32, no. 3 (2013): 65-66.

16 Omar Barghouti, "*BDS: Nonviolent, Globalized Palestinian Resistance to Israel's Settler Colonialism and Apartheid*," *Journal of Palestine Studies* 50, no. 2 (2021): 108-25.

17 Pietro Stefanini, "*Incendiary Kites and Balloons: Anti-Colonial Resistance in Palestine's Great March of Return*," *PARTECIPAZIONE E CONFLITTO* 14, no. 2 (2021): 663-680; Jihad Abusalim, "*The Great March of Return: An Organizer's Perspective*," *Journal of Palestine Studies* 47, no. 4 (2020): 90-100.

Rangkaian perlawanan nirkekerasan di atas menuai berbagai respons, dari pengabaian, peminggiran, hingga kekerasan fisik. Visibilitas dan dampak aksi-aksi ini sangat dipengaruhi berbagai hal, termasuk perpecahan internal aktor-aktor politik di Palestina, konfigurasi geopolitik yang dapat berubah dengan cepat, serta dinamika Israel-Palestina secara umum. Semua ini terangkum dengan baik, antara lain melalui buku "Peacemakers in Israel-Palestine" karya Robert Hostetter,¹⁸ artikel-artikel¹⁹ dan film dokumenter "Five Broken Cameras."²⁰

Perlawanan Kontemporer

Di bulan-bulan terakhir 2023, terjadi lonjakan besar perlawanan nirkekerasan terhadap pendudukan Israel dan solidaritas global terhadap warga Palestina. Jelas terlihat bahwa aktor yang terlibat, metode yang digunakan, serta cakupan geografisnya sangat beragam. Jika perlawanan pada masa sebelumnya lebih menitikberatkan pembangkangan sipil, perlawanan kontemporer tampaknya dipenuhi dengan upaya *calling out* narasi arus utama yang cenderung abai terhadap penderitaan warga Palestina.

Motaz Azaiza, seorang jurnalis foto Palestina berusia 24 tahun melaporkan dari reruntuhan Gaza bagaimana kekerasan Hamas dan Israel berdampak pada masyarakat sipil. Berkolaborasi dengan kanal-kanal media global dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat sipil, selama 108 hari ia bercerita bagaimana warga sipil bertahan di tengah serangan udara dan keduakaan.²¹ Ketika ia akhirnya harus meninggalkan Gaza, perjalanannya ke Doha, yang difasilitasi pesawat jet Qatar, membuka mata dunia akan tantangan yang dihadapi para jurnalis dalam meliput Gaza.²² Di tengah tingginya angka kematian jurnalis dan tuduhan yang ditimpakan Israel kepada mereka, Azaiza menunjukkan peran penting jurnalisme dalam menampilkan realita di lapangan. Jumlah pengikutnya di Instagram meningkat drastis sepanjang Oktober hingga Desember 2023, dari 25 ribu ke 18,5 juta.

Sebagaimana dituliskan oleh majalah Time, jurnalis Palestina memainkan peran kunci dalam perlawanan nirkekerasan terhadap pendudukan oleh Israel.²³ Para jurnalis seperti Hind Khoudary²⁴ dan Bisan Owda²⁵ tidak lagi sekadar mengambil posisi "pengamat" melainkan lebur dalam kehidupan warga. Di tengah pemadaman listrik dan internet, laporan Khoudary menggugah warga global akan tantangan hidup di tengah perang sambil melaporkan perang itu sendiri. Sementara itu, *video diary* Owda menyajikan perspektif personal yang apa adanya

18 Robert Hostetter, *Peacemakers in Israel-Palestine: Dialogues for a Just Peace* (London: Routledge, 2022).

19 Sarah Scruggs, "Understandings of Nonviolence and Violence: Joint Palestinian and International Nonviolent Resistance," in *Nonviolent Resistance in the Second Intifada: Activism and Advocacy*, ed. Maia Carter Hallward dan Julie M. Norman (New York: Palgrave Macmillan US, 2011): 69–86.

20 *Five Broken Cameras*, disutradai oleh Emad Burnat dan Guy Davidi. Alegria Productions, Burnat Films, Guy DVD Films, 2011.

21 Motaz Azaiza, *Instagram*, 30 Januari 2024.

22 Bethan McKernan, "Palestinian Journalist Leaves Gaza after 108 Days Chronicling War," *The Guardian*, 26 Januari 2024.

23 Yasmeen Serhan, "Palestinian Journalists Offer a Rare Glimpse Into Life in Gaza. But for How Long?," *TIME*, 8 Desember 2023.

24 Hind Khoudary, *Instagram*, 12 November 2023.

25 Bisan, *Instagram*, 30 Januari 2024.

mengenai hidup di bawah berondongan senjata, menggarisbawahi betapa kuat sekaligus rentannya para jurnalis. Kesemuanya ini menampilkan sisi manusia (*humanizing*) di balik statistika konflik, perang, dan pendudukan.

Banyak jurnalis kehilangan rumah, kolega, dan keluarga mereka. Angka kematian di kalangan mereka pun tinggi, sebagaimana disebutkan oleh Committee to Protect Journalists.²⁶ Plestia Alaqad²⁷ adalah salah seorang yang terpaksa mengambil pilihan sulit untuk mundur dari pekerjaannya demi alasan keamanan. Ada pula Wael al-Dahdouh, kepala biro Al Jazeera di Gaza yang harus terus menyampaikan cerita-cerita faktual dari lapangan di tengah kondisi mengenaskan, termasuk terbunuhnya istri dan dua anaknya dalam serangan udara Israel.²⁸ Apapun tantangannya, komitmen para jurnalis mendokumentasikan dampak perang terhadap warga Palestina tidak memudar. Laporan mereka tidak hanya menjadi sumber informasi bagi pihak luar, tetapi juga membuat warga Palestina merasa terhubung dengan dunia luar. Kerja mereka, yang dilakukan di atas risiko personal yang tinggi, menjadi bentuk perlawanan nirkekerasan tersendiri. Lebih jauh, kerja-kerja ini mewartakan aneka perlawanan nirkekerasan yang terjadi di tapak serta mewartakan kondisi lapangan yang selanjutnya memantik perlawanan nirkekerasan di luar Palestina.²⁹

Sejak 7 Oktober 2023, terjadi peningkatan pesat jumlah perlawanan nirkekerasan di West Bank, terutama dalam bentuk unjuk rasa dan mogok kerja. Jalanan seakan menjadi kanvas kolektif, di mana individu dengan latar yang beragam beramai-ramai menuangkan aspirasi mereka akan kondisi yang diwarnai keadilan, perdamaian, dan pemulihan HAM.³⁰

Sebuah artikel dari Haaretz, media Israel yang dikenal dengan investigasi mendalamnya, menuliskan bagaimana aneka demonstrasi di atas terjadi tidak hanya di West Bank. Ribuan orang tumpah ruah dalam demonstrasi-demonstrasi di kota-kota besar Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, dan Jerusalem, bahkan di depan rumah pribadi Perdana Menteri Netanyahu di Caesarea. Ini menggarisbawahi betapa perlawanan nirkekerasan menuntut pengakhiran pendudukan telah melampaui garis identitas dan geografi. Tingginya jumlah demonstran di kota-kota tersebut menunjukkan besarnya pengakuan dan solidaritas warga Israel terhadap hak warga Palestina, yang bisa mengarah pada terobosan dialog Israel-Palestina.³¹

26 Kathy Jones, "*Journalist Casualties in the Israel-Gaza War.*" Committee to Protect Journalists, 30 Januari 2024.

27 Plestia Alaqad, *Instagram*, 30 Januari 2024.

28 Al Jazeera, "*Al Jazeera's Gaza Bureau Chief Wael Dahdouh in Qatar for Medical Treatment.*" 17 Januari 2024.

29 Namita Singh, "*Al Jazeera journalist back reporting live from Gaza day after burying son killed in Israeli air strike.*" The Independent, 8 Januari 2024.

30 Al Jazeera, "*Photos: Occupied West Bank Strikes, Rallies for Palestinians in Gaza.*" 11 Desember 2023.

31 Adi Hashmonai, Ran Shimoni, dan Yael Freidson, "*Thousands Protest across Israel against Netanyahu's Government.*" Haaretz, 20 Januari 2024; Liza Rozovsky, "*Hundreds of Israelis Protest against Gaza War after Police Reverse Ban.*" Haaretz, 20 Januari 2024.

Gelombang protes nirkekerasan ini merupakan penanda penting di kawasan yang biasanya digambarkan penuh kekerasan saja. Terlihat jelas bagaimana warga lebih banyak meniru cara-cara Gandhi, daripada cara-cara kekerasan, dalam mewujudkan tujuan politik dan sosial. Ini menunjukkan pemahaman di kalangan warga bahwa perdamaian dan keadilan berkelanjutan hanya dapat ditempuh melalui cara-cara nirkekerasan, yang didukung oleh massa dengan beragam latar belakang usia, agama, etnisitas, afiliasi politik, dan sebagainya.

Solidaritas Global

Dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan pembebasan Palestina sesungguhnya telah dimulai sejak awal pendudukan Israel. Meski demikian, dukungan tersebut meningkat dengan pesat sejak 7 Oktober 2023, seiring dengan semakin terkikisnya narasi arus utama yang biasanya tidak berpihak pada Palestina.

Salah satu yang selalu lantang menentang pendudukan Israel atas Palestina adalah Jewish Voices for Peace (JVP), wadah bagi ribuan warga Yahudi Amerika Serikat dengan latar belakang Yahudi mengorganisir diri. Di tengah padatnya lalu lintas New York City pada Jumat, 27 Oktober 2023, JVP menduduki stasiun kereta api Grand Central. Ribuan dari mereka memenuhi stasiun dan berseru “Gencatan senjata, sekarang!” dan “Biarkan (warga) Gaza hidup!” hingga melumpuhkan jadwal keberangkatan kereta api. Saat polisi datang, menutup pintu masuk stasiun, lalu menangkap sekitar 400 aktivis di dalam stasiun, kerumunan massa secara spontan terbentuk di luar stasiun. Ini merupakan pembangkangan sipil terbesar di New York Sipil sejak Perang Irak.³² Di malam kedelapan Hanukkah, JVP memblokir delapan jembatan dan jalan keluar tol di delapan kota besar Amerika Serikat guna menuntut diakhirinya genosida terhadap warga Palestina – “delapan kota sebagai simbol delapan lilin yang dinyalakan di malam terakhir Hanukkah, termasuk *shamash*, atau lilin penolong.”³³

Blokade dan pendudukan stasiun-stasiun kereta api terjadi pula di kota-kota lain di Amerika Serikat, termasuk Union Station di Washington, DC, South Station di Boston, dan Pennsylvania Station di Baltimore. Bentuk protes lain yang menarik perhatian publik adalah tutupnya toko-toko di banyak bagian New York City, termasuk toko-toko milik warga keturunan Arab di Brooklyn.³⁴

Di belahan dunia lain, para pekerja melakukan mogok, boikot, atau blokade guna menghambat pengiriman senjata ke Israel. Termasuk di dalamnya adalah mogok dan boikot serikat pekerja pelabuhan di Italia, Yunani, dan Turki yang menolak memuat senjata ke kapal, serta blokade di Pelabuhan Melbourne terhadap kapal-kapal Israel.³⁵ Sementara itu, di Lebanon, so-

32 Claire Fahy, Julian Roberts-Grmela, dan Sean Piccoli, “*Let Gaza Live: Calls for Cease-Fire Fill Grand Central Terminal*,” The New York Times, 28 Oktober 2023.

33 Kanishka Singh, Hannah Beier, dan Kanishka Singh, “*US Jewish Group Protests in Eight Cities for Gaza Ceasefire*,” Reuters, 15 Desember 2023; Madeleine Hall, “*We Shut down 8 Bridges in 8 Cities on the 8th Night of Hanukkah*,” JVP, 2023.

34 Natalia Marques, “*No more business as usual: the world shuts it down for Palestine*,” Peoples Dispatch, 18 November 2023.

35 Peoples Dispatch, “*European trade unions intensify actions of solidarity with Palestine*,” 11 November 2023; Briana Charles, “*Australia’s pro-Palestinian activists to continue targeting Israeli ships*,” Al Jazeera, 29 Januari 2024.

lidaritas ditunjukkan dengan menutup sementara institusi publik, bank, sekolah, dan universitas.³⁶ Di Yordania, toko dan restoran di kota-kota Amman, Zarqa, dan Irbid juga sempat tutup. Di Belanda, aktivis menumpahkan ribuan selebaran dari atap mal berisi himbauan menghindari produk-produk pro pendudukan Israel.³⁷ Adapun di Glasgow, Manila, dan beberapa kota lain, mahasiswa melakukan *walkout* dan mogok.

Pada akhir November 2023, data Reuters menunjukkan bahwa sebagian besar demonstrasi di berbagai penjuru dunia mengambil posisi pro-Palestina.³⁸ Dari Washington, DC, New York City, Berlin, Paris, Vienna, London, Johannesburg, Melbourne, São Paulo, Seoul, Sanaa, Colombo, Kuala Lumpur, hingga Jakarta dan banyak kota lainnya, warga dunia menuntut gencatan senjata di Gaza dan berakhirnya pendudukan Israel di Palestina. Secara khusus, demonstrasi di Johannesburg pada 29 November 2023 menggarisbawahi kemiripan kondisi di Palestina dengan di Afrika Selatan sebelumnya, di mana keduanya diwarnai politik *apartheid*.³⁹ Ini menjadi pijakan bagi langkah Afrika Selatan selanjutnya, yaitu menyeret Israel ke ICJ atas tuduhan genosida.

Berbagai sumber menunjukkan bahwa sebagian besar demonstrasi di atas bersifat nirkekerasan, meski beberapa kemudian berubah menjadi kekerasan. Di Amerika Serikat, terjadi demonstrasi tandingan di mana pendukung Palestina dan pendukung Israel berhadapan. Beberapa kejadian penting, seperti perintah evakuasi di Gaza dan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli al-Arabi mengintensifikasi protes global ini.⁴⁰ Beberapa demonstrasi berlangsung secara lebih kreatif, misalnya memanfaatkan ajang konferensi iklim COP 28 di Dubai, mengingat sempitnya kebebasan berekspresi di Uni Emirat Arab.⁴¹

Aksi-aksi "konvensional" di atas berkelindan dengan aksi-aksi yang simbolik. Penggunaan semangka misalnya, menjadi bentuk *algospeak* yang secara cerdas dalam mengakali algoritma media sosial yang biasanya membatasi konten-konten pro-Palestina.⁴² Semangka, dengan kulitnya yang hijau, pinggirnya yang putih, dagingnya yang merah, dan bijinya yang hitam, mengingatkan pada warna-warni bendera Palestina. Paralelisme ini memungkinkan suatu buah yang sederhana dan dapat ditemukan di seluruh dunia berubah menjadi simbol pemer-satu suara-suara solidaritas terhadap Palestina. Simbol lain yang mengemuka adalah *keffiyeh* dan sulaman-sulaman khas Palestina. Apapun kewarganegaraannya, warga dunia tidak ragu mengenakan potongan kain di tersebut, bukan hanya sebagai ekspresi solidaritas, tetapi juga perlawanan terhadap penghapusan identitas kultural Palestina yang selama ini gencar terjadi di bawah okupasi Israel.

36 TRT World, "[In pictures: Global strike in solidarity with Palestine's Gaza](#)," Desember 2023.

37 Tariq Tahir, "[Pro-Gaza activists stage protest in Amsterdam department store](#)," The National News, 26 Desember 2023.

38 Prasanta Kumar Dutta et al., "[Mapping the Conflict in Israel and Gaza](#)," Reuters, 22 Desember 2023.

39 Mogomotsi Magome, "[South Africa March Demands a Permanent Gaza Cease-Fire on Day of Solidarity with Palestinians](#)," AP News, 29 November 2023.

40 Prasanta Kumar Dutta et al., "[Mapping the Conflict in Israel and Gaza](#)," Reuters, 22 Desember 2023.

41 Alexander Cornwell, "[COP28 a Rare Chance in UAE for Protests on Palestinians, Climate Action](#)," Reuters, 3 Desember 2023.

42 Anna Furman, "[How Watermelon Imagery, a Symbol of Solidarity with Palestinians, Spread around the Planet](#)," AP News, 19 Januari 2024.

Di media sosial, bermunculan aneka kampanye bertagar, misalnya #GazaUnderSiege, #GazaGenocide, #FreePalestine, #CeasefireNOW, dan #FromTheRiverToTheSea. Aneka tagar ini tidak hanya berperan meningkatkan kesadaran global dan mengkonsolidasi suara pro-Palestina, melainkan juga meringkai ulang persoalan dari “konflik Israel-Palestina” menjadi “genosida” atau “pendudukan Israel atas Palestina.” Solidaritas digital ini menjadi modal penting mobilisasi dukungan internasional.⁴³

Seni juga menjadi wadah perlawanan yang penting. Di dalam maupun di luar Palestina, bermunculan mural, grafiti, dan aneka seni jalanan lain yang secara kuat mengangkat kondisi di wilayah pendudukan sekaligus mengenang mereka yang berpulang. Shepard Fairey, pencipta poster “HOPE” untuk kampanye Barack Obama, adalah satu di antara banyak seniman yang ikut dalam proyek Unmute Gaza.⁴⁴ Inisiatif semacam ini ikut menggaungkan karya jurnalis foto Palestina di tengah pelarangan yang dikenakan oleh pemerintah Israel. Fairey dan seniman lainnya mentransformasi gambar-gambar yang mereka peroleh dari Gaza menjadi lukisan dan sketsa dengan ikon “mute” di tengahnya. Aneka karya seni ini dapat diunduh secara bebas dan gratis di laman proyek tersebut. Semua orang didorong mengunduh, mencetak, dan menempelkannya di berbagai tembok dan ruangan di kota masing-masing.⁴⁵ Platform lain dengan semangat yang sama adalah Artists Against Apartheid. Aneka perlawanan yang muncul di ranah seni ini memuncak sekitar Natal, saat individu dan kelompok saling membagikan kartu Natal yang menggambarkan kelahiran Yesus Kristus, bukan di kandang yang damai, melainkan di tengah peperangan yang sarat kekerasan.

Di ranah akademik, muncul banyak diskusi, lokakarya, dan seminar mengenai Palestina, baik secara formal maupun informal. Upaya-upaya pembelajaran publik ini penting mengingat kompleksitas persoalannya, dan juga jarak geografis maupun emosional beberapa komunitas dengan pengalaman Palestina. Hanya dengan forum-forum semacam ini, masyarakat global mendapatkan informasi kredibel yang nantinya membentuk pemahaman dan empati mereka terhadap perjuangan Palestina.

Salah satu buah penting dari solidaritas global ini adalah pergeseran bingkai, yang kemudian menjadi landasan melanjutkan perlawanan nirkekerasan di jalanan dan di dunia maya ke ranah hukum. Sebagaimana terlihat dalam forum “Roundtable: Locating Palestine in Third World Approaches to International Law (TWAAIL)” yang diselenggarakan pada musim semi 2023, muncul kesadaran akan pentingnya kalangan hukum internasional menggunakan bingkai yang lebih akurat dalam melihat perjuangan Palestina.⁴⁶ Mengetengahkan cara pandang Global South terhadap hukum internasional, TWAAIL menekankan pentingnya diskursus hukum internasional menyesuaikan dengan realita kolonialisme dan opresi.⁴⁷ Pergeseran bingkai ini

43 Harmeet Kaur, “*Violence in Gaza Turned These Everyday Palestinians into Chroniclers of War*,” CNN, 19 Januari 2024.

44 Lee Moran, “*The Powerful Street Art Campaign Spotlights Israel’s War On Gaza*,” Huffington Post, 31 Januari 2024.

45 UNMUTE GAZA, “*#UNMUTEGAZA*,” 2024.

46 Noura Erakat et al., “*Roundtable: Locating Palestine in Third World Approaches to International Law*,” *Journal of Palestine Studies*, (2023): 1–15.

47 Noura Erakat et al., “*Roundtable: Locating Palestine in Third World Approaches to International Law*,” *Journal of Palestine Studies*, (2023): 1–15.

terlihat jelas dari yang kemudian disampaikan oleh Profesor Max du Plessis, salah seorang wakil Afrika Selatan dalam sidang ICJ Januari 2024,

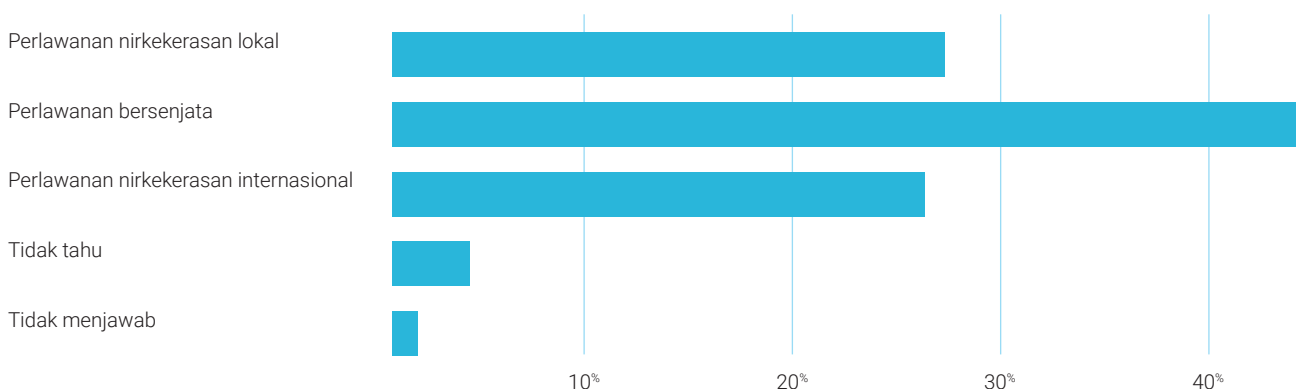
“Yang terjadi di Gaza saat ini telah secara keliru dibingkai sebagai sekadar konflik antara dua pihak. Yang terjadi, sesungguhnya, adalah aksi-aksi penghancuran oleh Israel sebagai penguasa pendudukan (*occupying power*), yang secara opresif dan berkepanjangan, selama lebih dari setengah abad, melanggar hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Aneka pelanggaran ini terjadi di dunia di mana Israel menempatkan dirinya di luar dan di atas jangkauan hukum.”⁴⁸

Tantangan

Meski perjuangan bersenjata dapat pada titik tertentu dianggap sah oleh hukum internasional, diskursus mengenai keutamaan perjuangan nirkekerasan terus meningkat.⁴⁹ Ini bukan dikarenakan ketiadaan opsi kekerasan, tetapi didasari pertimbangan-pertimbangan strategis, termasuk kohesi sosial dan peluang keberhasilan.⁵⁰

Sebuah studi oleh Dana el Kurd mengenai opini publik di Palestina menunjukkan hubungan yang kompleks antara preferensi masyarakat terhadap perjuangan bersenjata versus perjuangan nirkekerasan. Sebagaimana terlihat pada grafik berikut, meski perjuangan bersenjata masih menjadi pilihan yang menarik bagi banyak warga Palestina, preferensi terhadap penggunaan strategi nirkekerasan sangat meningkat. Preferensi terhadap nirkekerasan, di tengah meningkatnya represi oleh lawan dan proses perdamaian yang stagnan, menunjukkan kedewasaan perjuangan pembebasan Palestina.⁵¹ Meski demikian, polarisasi dan kerentanan preferensi ini tidak dapat diabaikan.

Diagram 1 Preferensi perlawanan di Palestina



48 International Court of Justice, “*Public sitting held on Thursday 11 January 2024, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Donoghue presiding, in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*,” 2024.

49 Nizar Mimbles, “*Is Nonviolence Relevant for the Palestinian Struggle?*,” Mondoweiss, 28 Februari 2023.

50 Dana El Kurd, “*Support for Violent Versus Non-Violent Strategies in the Palestinian Territories*,” *Middle East Law and Governance* 14, no. 3 (2022): 331–365.

51 Dana El Kurd, “*Armed Resistance versus Nonviolent Strategies: An Analysis of Palestinian Public Opinion*,” *Al-Muntaqa* 3, no. 2 (2020): 80–86.

Salah satu tantangan penting yang dihadapi gerakan pembebasan Palestina adalah pembungkaman (*silencing*) dan sensor terhadap konten-konten pro-Palestina, terutama oleh Meta, yang menaungi platform media sosial seperti Instagram dan Facebook.⁵² Antara Oktober dan 2023, lebih dari 1.050 konten pro-Palestina yang berasal 60 negara lebih, diturunkan atau dihalangi oleh Instagram dan Facebook. Sensor berlebih oleh Meta ini memunculkan pertanyaan mengenai komitmen perusahaan tersebut terhadap HAM.⁵³

Belakangan ini, kebebasan berekspresi warga di berbagai belahan dunia mengenai isu Palestina semakin diuji. Bahkan, beberapa ahli dari PBB menyatakan kekhawatiran mereka atas serangan, kriminalisasi, dan sanksi yang dijatuhkan kepada banyak individu yang bersolidaritas dengan para korban kekerasan di Gaza. Di Israel sendiri, langkah-langkah legislatif seperti mengamandemen Undang-Undang Anti-Terrorisme memungkinkan negara mengawasi lebih ketat penggunaan media sosial. Di West Bank dan Gaza, pembatasan kebebasan berekspresi juga diterapkan oleh para otoritas Palestina.⁵⁴

Sementara itu, akademisi, jurnalis, seniman, dan aktivis di berbagai belahan dunia mengalami pembungkaman, sensor, dan intimidasi dalam bentuk yang berbeda-beda.⁵⁵ Bagi para akademisi dan jurnalis, hal ini mencakup pembatasan kebebasan akademik melalui penolakan pendanaan riset, tindakan disipliner, atau pelecehan secara daring. Selain itu, undangan yang mereka peroleh untuk menghadiri wawancara dan konferensi pers kerap kali dibatalkan, sehingga membatasi kemampuan mereka berbagi perspektif dan hasil penelitian mereka. Di jalanan, aksi demonstrasi membela Palestina pun semakin dibatasi melalui pemberlakuan peraturan-peraturan yang ketat, penolakan izin, serta penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dari aparat keamanan.⁵⁶

Menatap ke Depan

Sejak 7 Oktober 2023 hingga tulisan ini dibuat, lebih dari 27 ribu warga telah terbunuh, lebih dari separuh hunian di Gaza hancur atau rusak, dan setidaknya 378 fasilitas pendidikan tidak lagi dapat digunakan.⁵⁷ Upaya-upaya mendorong gencatan senjata terhadap veto di Dewan Keamanan PBB. Bagaimanapun, masih terdapat secercah harapan, terutama semenjak keluarnya putusan ICJ pada 26 Januari 2024.⁵⁸

Generasi muda selalu memainkan peran penting di Palestina. Ini diilustrasikan dengan jelas dalam buku "Popular Protest in Palestine: The Uncertain Future of Unarmed Resistance" oleh pembimbing disertasi saya, Andrew Rigby, dan kawannya, Marwan Darweish. Mereka meng-

52 Richard Luscombe, "[Meta Censors Pro-Palestinian Views on a Global Scale, Report Claims](#)," The Guardian, 21 Desember 2023.

53 Rasha Younes, "[Meta's Broken Promises](#)," Human Rights Watch, 21 Desember 2023.

54 Mohamed Mandour, "[Attacks, Arrests, Threats, Censorship: The High Risks of Reporting the Israel-Gaza War](#)," Committee to Protect Journalists, 1 Februari 2024.

55 Wilfred Chan, "[The Palestine Exception: Why pro-Palestinian Voices Are Suppressed in the US](#)," The Guardian, 1 November 2023.

56 OHCHR, "[Speaking out on Gaza / Israel must be allowed: UN experts](#)," 23 November 2023.

57 AJLabs, "[Israel-Gaza War in Maps and Charts: Live Tracker](#)," Al Jazeera, 9 Oktober 2023.

58 Justin Salhani, "[What the ICJ's Interim Ruling Means for Israel's War on Gaza](#)," Al Jazeera, 26 Januari 2024.

utip seorang aktivis Palestina mengenai ketimpangan relasi kuasa dan dukungan internasional terhadap Israel, tetapi tetap menyimpan harapan perubahan. Aktivis ini menggarisbawahi hak untuk hidup bebas di tanahnya sendiri dan meyakini pendudukan Israel akan berakhir. Generasi muda yang masih aktif berjuang ini menjadi sumber harapan tersendiri – mereka berhasil melampaui rasa takut dan karenanya dapat melawan opresi Israel.⁵⁹

Suatu hari di akhir 1980-an, di tengah Intifada Pertama, menjadi momentum penting bagi seorang anak sekolah di Norwegia. Di tengah rutinitas membaca koran, ia menemukan bagaimana peta daerah pendudukan Palestina sangat berbeda jauh dengan apa yang digambarkan dalam pelajaran-pelajaran Al-Kitab. Sangat kontras dengan bayangannya mengenai Bethlehem, tempat lahir Yesus Kristus, peta ini dipenuhi kekerasan dan perjuangan untuk menentukan nasib sendiri. Kesadaran baru ini, yang muncul di wilayah yang jauh dari kekacauan, melahirkan *lifelong passion* mendalami hubungan internasional dan HAM, lalu menuntunnya bekerja untuk PBB. Loncat ke penghujung 2023, Bethlehem yang biasanya menjadi kota ziarah dan perayaan di seputar Natal dirundung sunyi dan duka. Jalanan yang biasanya ramai dengan aneka aktivitas berkabung untuk Gaza.⁶⁰ Kontras yang sangat kuat antara narasi damai Bethlehem yang ada di kitab suci dengan realita kedukaan yang ada saat ini menyatu dengan kompleksitas perjuangan Palestina.

Persandingan antara masa lalu dan masa kini, antara narasi agama dan realita lapangan, seakan menangkap esensi dari perlawanan nirkekerasan Palestina. Ia merefleksikan bagaimana informasi dan nirkekerasan memiliki dampak yang tidak hanya kuat, tetapi juga jauh melintasi jarak dan waktu. Metode aksi nirkekerasan #10 menunjukkan bagaimana media dapat mempengaruhi perspektif global, dan bahkan menggerakkan saya beberapa dekade lalu, saat masih menjadi anak sekolah di Norwegia.⁶¹

59 Marwan Darweish and others, *Popular Protest in Palestine: The Uncertain Future of Unarmed Resistance* (London: Pluto Press, 2015).

60 Bethan McKernan, "*Sorrow and Silence*" in Bethlehem as Christmas Festivities Are Cancelled," The Guardian, 25 Desember 2023.

61 Gene Sharp, "*The Intifadah and Nonviolent Struggle*," *Journal of Palestine Studies* 19, no. 1 (1989): 3–13.

METODE-METODE PROTES DAN PERSUASI

- #1 Public Speeches**
Pidato di Hadapan Publik
- #2 Letters of Opposition or Support**
Mengirim Surat Penolakan atau Dukungan
- #3 Declarations by Organizations and Institutions**
Deklarasi oleh Organisasi dan Institusi
- #4 Signed Public Statements**
Pernyataan Publik yang Ditandatangani
- #5 Declarations of Indictment and Intention**
Deklarasi berisi Dakwaan dan Seruan
- #6 Group or Mass Petitions**
Petisi oleh Kelompok atau Massa
- #7 Slogans, Caricature, and Symbols**
Slogan, Karikatur, dan Simbol
- #8 Banners, Posters, and Displayed Communications**
Spanduk, Poster, dan Komunikasi Visual
- #9 Leaflets, Pamphlets and Books**
Selebaran, Pamflet, dan Buku
- #10 Newspapers and Journals**
Surat Kabar dan Jurnal
- #11 Records, Radio and Television**
Album Rekaman, Radio, dan Televisi
- #12 Skywriting and Earthwriting**
Menulis di Langit dan Tanah
- #13 Deputations**
Mengirimkan Perwakilan
- #14 Mock Awards**
Penghargaan Lancung
- #15 Group Lobbying**
Lobi Kelompok
- #16 Picketing**
Piket
- #17 Mock Elections**
Pemilu Lancung
- #18 Displays of Flags and Symbolic Colors**
Bendera dan Warna Simbolis
- #19 Wearing of Symbols**
Mengenakan Simbol
- #20 Prayers and Worship**
Doa dan Peribadatan
- #21 Delivering Symbolic Objects**
Mempersembahkan Barang Simbolis
- #22 Protest Disrobings**
Protes dengan Melepas Pakaian
- #23 Destruction of Own Property**
Merusak Barang Milik Sendiri
- #24 Symbolic Lights**
Cahaya Simbolis
- #25 Displays of Portrait**
Memajang Potret
- #26 Paint as Protest**
Menggunakan Cat sebagai Alat Protes

- #27 New Signs and Names**
Memasang Nama dan Penanda Jalan yang Baru
- #28 Symbolic Sounds**
Bunyi-bunyian Simbolis
- #29 Symbolic Reclamation**
Reklamasi Simbolis
- #30 Rude Gestures**
Perilaku Kasar
- #31 "Haunting" Officials**
"Menghantui" Pejabat
- #32 Taunting Officials**
Menghina Pejabat
- #33 Fraternization**
Berkawan dengan Lawan
- #34 Vigils**
Bertirakat
- #35 Humorous Skits and Pranks**
Lawak dan Lelucon
- #36 Performances of Plays and Music**
Pertunjukan Seni Peran dan Musik
- #37 Singing**
Menyanyi
- #38 Marches**
Berjalan dalam Barisan
- #39 Parades**
Pawai atau Arak-arakan
- #40 Religious Processions**
Prosesi Keagamaan
- #41 Pilgrimages**
Ziarah
- #42 Motorcades**
Iring-iringan Kendaraan Bermotor
- #43 Political Mourning**
Perkabungan Politik
- #44 Mock Funerals**
Pemakaman Lancung
- #45 Demonstrative Funerals**
Pemakaman Demonstratif
- #46 Homage at Burial Places**
Penghormatan di Tempat Pemakaman
- #47 Assemblies of Protest or Support**
Unjuk Rasa atau Demonstrasi
- #48 Protest Meetings**
Pertemuan Protes
- #49 Camouflaged Meetings of Protest**
Pertemuan Protes Terselubung
- #50 Teach-ins**
Ikut Mengajar
- #51 Walkouts**
Keluar Meninggalkan Acara
- #52 Silence**
Aksi Diam
- #53 Renouncing Honors**
Mengembalikan Penghargaan
- #54 Turning One's Back**
Memunggungungi

METODE-METODE NONKOOPERASI

- #55 Social Boycott**
Pengucilan
- #56 Selective Social Boycott**
Pengucilan Selektif
- #57 Lysistratic Nonaction**
Menolak Keintiman
- #58 Excommunication**
Ekskomunikasi
- #59 Interdict**
Menghentikan Layanan Kerohanian
- #60 Suspension of Social and Sports Activities**
Menangguhkan Kegiatan Sosial dan Olahraga
- #61 Boycott of Social Affairs**
Boikot Acara Sosial
- #62 Student Strike**
Pemogokan Pelajar
- #63 Social Disobedience**
Pembangkangan Sosial
- #64 Withdrawal from Social Institutions**
Menarik Diri dari Institusi Sosial
- #65 Stay-at-home**
Menetap di Rumah
- #66 Total Personal Noncooperation**
Nonkooperasi Penuh oleh Individu
- #67 "Flight" of Workers**
Kepergian Pekerja
- #68 Sanctuary**
Mencari Suaka
- #69 Collective Disappearance**
Menghilang Bersama
- #70 Protest Emigration (Hijrat)**
Hijrah
- #71 Consumers' Boycott**
Boikot oleh Konsumen
- #72 Nonconsumption of Boycotted Goods**
Tidak Mengonsumsi Barang yang Diboikot
- #73 Policy of Austerity**
Memilih Kesahajaan
- #74 Rent Withholding**
Menangguhkan Membayar Sewa
- #75 Refusal to Rent**
Menolak Menyewa
- #76 National Consumers' Boycott**
Boikot Konsumen di Tingkat Nasional
- #77 International Consumers' Boycott**
Boikot Konsumen di Tingkat Internasional
- #78 Workmen's Boycott**
Boikot Alat Kerja
- #79 Producers' Boycott**
Boikot oleh Produsen
- #80 Suppliers' and Handlers' Boycott**
Boikot oleh Perantara

- #81 Traders' Boycott**
Boikot oleh Pedagang
- #82 Refusal to Let or Sell Property**
Menolak Menyewakan atau Menjual Properti Milik Sendiri
- #83 Lockout**
Mengunci Tempat Produksi
- #84 Refusal of Industrial Assistance**
Menolak Membantu Kegiatan Industri
- #85 Merchants' "General Strike"**
Pemogokan Pedagang
- #86 Withdrawal of Bank Deposits**
Menarik Tabungan Bank
- #87 Refusal to Pay Fees, Dues and Assessment**
Menolak Membayar Ongkos dan Iuran
- #88 Refusal to Pay Debts or Interest**
Menolak Membayar Hutang atau Bunga
- #89 Severance of Funds and Credit**
Memotong Sumber Dana
- #90 Revenue Refusal**
Menolak Berkontribusi terhadap Pendapatan Negara
- #91 Refusal of a Government's Money**
Menolak Uang yang Dikeluarkan Pemerintah
- #92 Domestic Embargo**
Pembatasan Barang di Dalam Negeri
- #93 Blacklisting of Traders**
Pencekalan Pedagang
- #94 International Sellers' Embargo**
Pembatasan Penjualan Barang ke Negara Tertentu
- #95 International Buyers' Embargo**
Pembatasan Pembelian Barang dari Negara Tertentu
- #96 International Trade Embargo**
Pembatasan Jual-Beli Barang dengan Negara Tertentu
- #97 Protest Strike**
Pemogokan Pekerja
- #98 Quickie Walkout (Lightning Strike)**
Pemogokan Kilat
- #99 Peasant Strike**
Pemogokan Buruh Tani
- #100 Farm Workers' Strike**
Pemogokan Pekerja Perkebunan
- #101 Refusal of Impressed Labor**
Menolak Kerja Paksa
- #102 Prisoners' Strike**
Pemogokan Narapidana
- #103 Craft Strike**
Pemogokan Pengrajin atau Artisan
- #104 Professional Strike**
Pemogokan Kelompok Profesi
- #105 Establishment Strike**
Pemogokan Pekerja Seinduk Perusahaan
- #106 Industry Strike**
Pemogokan Sektor Industri
- #107 Sympathetic Strike**
Pemogokan Berdasarkan Simpati
- #108 Detailed Strike**
Pemogokan Beruntun oleh Pekerja dalam Satu Perusahaan
- #109 Bumper Strike**
Pemogokan Beruntun oleh Kelompok Pekerja dalam Satu Industri
- #110 Slowdown Strike**
Pemogokan dengan Memperlambat Ritme Kerja
- #111 Working-to-rule Strike**
Pemogokan dengan Mematuhi Peraturan
- #112 Reporting "Sick" (Sick-in)**
Berpura-pura Sakit
- #113 Strike by Resignation**
Pemogokan dengan Mengundurkan Diri
- #114 Limited Strike**
Pemogokan Terbatas
- #115 Selective Strike**
Pemogokan Selektif
- #116 Generalized Strike**
Pemogokan Multisektoral oleh Sebagian Pekerja
- #117 General Strike**
Pemogokan Multisektoral oleh Sebagian Besar Pekerja
- #118 Hartal**
Penangguhan Sesaat Kegiatan Ekonomi
- #119 Economic Shutdown**
Penghentian Total Kegiatan Ekonomi
- #120 Withholding or Withdrawal of Allegiance**
Menangguhkan atau Menarik Kesetiaan
- #121 Refusal of Public Support**
Menolak Memberi Dukungan Terbuka
- #122 Literature and Speeches Advocating Resistance**
Publikasi dan Pidato yang Menyerukan Perlawanan
- #123 Boycott of Legislative Bodies**
Boikot terhadap Lembaga Legislatif
- #124 Boycott of Elections**
Boikot terhadap Pemilu
- #125 Boycott of Government Employment and Positions**
Boikot terhadap Posisi dan Pekerjaan di Lembaga Pemerintahan
- #126 Boycott of Government Department, Agencies and Other Bodies**
Boikot terhadap Lembaga-Lembaga Pemerintahan
- #127 Withdrawal from Government Educational Institutions**
Menarik Diri dari Institusi Pendidikan Negeri
- #128 Boycott of Government-supported Organizations**
Boikot terhadap Organisasi-Organisasi yang Didukung Pemerintah
- #129 Refusal of Assistance to Enforcement Agents**
Menolak Membantu Aparat Penegak Hukum
- #130 Removal of Own Signs and Placemarks**
Mencopot Petunjuk dan Penanda Tempat
- #131 Refusal to Accept Appointed Officials**
Menolak Pejabat yang Ditunjuk
- #132 Refusal to Dissolve Existing Institutions**
Menolak Membubarkan Institusi
- #133 Reluctant and Slow Compliances**
Mengikuti Perintah dengan Enggan dan Lamban
- #134 Nonobedience in Absence of Direct Supervision**
Pembangkangan Saat Tidak Ada Pengawasan
- #135 Popular Nonobedience**
Pembangkangan Massal oleh Warga
- #136 Disguised Nonobedience**
Pembangkangan Terselubung
- #137 Refusal of an Assemblage or Meeting to Disperse**
Menolak Membubarkan Diri
- #138 Sitdown**
Duduk Menarik Diri
- #139 Noncooperation with Conscription and Deportation**
Menolak Mendukung Wajib Militer dan Kebijakan Deportasi
- #140 Hiding, Escape and False Identities**
Bersembunyi, Lari, dan Menggunakan Identitas Palsu
- #141 Civil Disobedience of "Illegitimate" Laws**
Pembangkangan Sipil terhadap "Aturan Hukum yang Tak Berdasar"
- #142 Selective Refusal of Assistance by Government Aides**
Pembangkangan Selektif oleh Pegawai Pemerintah
- #143 Blocking of Lines of Command and Information**
Memblokade Jalur Komando dan Informasi
- #144 Stalling and Obstruction**
Memperlambat atau Menghalangi Pekerjaan Sendiri
- #145 General Administrative Noncooperation**
Pembangkangan Massal oleh Pegawai Pemerintah
- #146 Judicial noncooperation**
Pembangkangan oleh Lembaga Yudikatif
- #147 Deliberate Inefficiency and Selective Noncooperation by Enforcement Agents**
Kinerja yang Tidak Efisien dan Pembangkangan Selektif oleh Aparat Penegak Hukum
- #148 Mutiny**
Pembelotan oleh Polisi atau Tentara
- #149 Quasi-Legal Evasions and Delays**
Membuat atau Memanfaatkan Aturan guna Menghindar atau Memperlambat Proses

- #150 Noncooperation by Constituent Governmental Units**
Pembangkangan oleh Unit-Unit Pemerintahan
- #151 Changes in Diplomatic and Other Representation**
Mengubah Perwakilan Diplomatik dan Lainnya
- #152 Delay and Cancellation of Diplomatic Events**
Menunda atau Membatalkan Acara Diplomatik
- #153 Withholding of Diplomatic Recognition**
Menangguhkan Pengakuan Diplomatik
- #154 Severance of Diplomatic Relations**
Memotong Hubungan Diplomatik
- #155 Withdrawal from International Organization**
Mengundurkan Diri dari Organisasi Internasional
- #156 Refusal of Membership in International Bodies**
Menolak Keanggotaan di Badan Internasional
- #157 Expulsion from International Organization**
Memecat Keanggotaan Organisasi Internasional
- METODE-METODE INTERVENSI**
- #158 Self-Exposure to the Elements**
Membuat Diri Terpapar Bahaya
- #159 The Fast**
Berppuasa atau Mogok Makan
- #160 Reverse Trial**
Pengadilan "Terbalik"
- #161 Nonviolent Harassment**
Mengganggu secara Nirkekerasan
- #162 Sit-in**
Ikut Duduk
- #163 Stand-in**
Ikut Berdiri
- #164 Ride-in**
Ikut Menumpang Kendaraan
- #165 Wade-in**
Ikut Bermain Air
- #166 Mill-in**
Ikut Lalu-lalang
- #167 Pray-in**
Ikut Berdoa
- #168 Nonviolent Raids**
Menyerbu secara Nirkekerasan
- #169 Nonviolent Air Raids**
Menyerbu Udara secara Nirkekerasan
- #170 Nonviolent Invasion**
Menerobos secara Nirkekerasan
- #171 Nonviolent Interjection**
Mengadang secara Nirkekerasan
- #172 Nonviolent Obstruction**
Memblokade secara Nirkekerasan
- #173 Nonviolent Occupation**
Menduduki secara Nirkekerasan
- #174 Establishing New Social Patterns**
Menetapkan Pola Sosial Baru
- #175 Overloading of Facilities**
Memberi Beban Berlebih kepada Fasilitas Umum
- #176 Stall-in**
Ikut Memperlambat Proses
- #177 Speak-in**
Ikut Bicara
- #178 Guerrilla Theater**
Teater Gerilya
- #179 Alternative Social Institutions**
Membangun Institusi-Institusi Sosial Alternatif
- #180 Alternative Communication System**
Membangun Sistem Komunikasi Alternatif
- #181 Reverse Strike**
Pemogokan "Terbalik"
- #182 Stay-in Strike**
Pemogokan dengan Bertahan di Tempat Kerja
- #183 Nonviolent Land Seizure**
Merampas Tanah secara Nirkekerasan
- #184 Defiance of Blockades**
Pembangkangan terhadap Blokade
- #185 Politically Motivated Counterfeiting**
Pemalsuan Bermotif Politik
- #186 Preclusive Purchasing**
Memorong Pembelian
- #187 Seizure of assets**
Merampas Aset
- #188 Dumping**
Menjual Murah
- #189 Selective Patronage**
Memberikan Dukungan Ekonomi secara Selektif
- #190 Alternative Markets**
Membangun Pasar Alternatif
- #191 Alternative Transportation System**
Membangun Sistem Transportasi Alternatif
- #192 Alternative Economic Institutions**
Membangun Institusi Ekonomi Alternatif
- #193 Overloading of Administrative Systems**
Memberi Beban Berlebih kepada Sistem Administrasi Pemerintahan
- #194 Disclosing Identities of Secret Agents**
Membocorkan Identitas Agen Rahasia
- #195 Seeking Imprisonment**
Meminta Dipenjarakan
- #196 Civil Disobedience of "Neutral" Laws**
Pembangkangan Sipil terhadap "Aturan Hukum yang Netral"
- #197 Work-on without Collaboration**
Terus Menjalankan Tugas tanpa Berkolaborasi dengan Lawan
- #198 Dual Sovereignty and Parallel Government**
Membangun Kedaulatan Ganda dan Pemerintahan Paralel

Sumber:

Gene Sharp, *The Politics of Nonviolent Action. Part 2: The Methods of Nonviolent Action* (Bedford: Porter Sargent Publishing, 1973).

Riwayat Singkat Penulis

Daniel Petz adalah dosen tamu di Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI), Universitas Gadjah Mada. Ia mengampu kelas-kelas mengenai nirkekerasan, transformasi konflik, dan keadilan iklim. Tahun ini, ia juga mengampu kelas mengenai filsafat nirkekerasan di Universitas Graz, Austria. Di tim DPD, ia memfokuskan diri pada riset-riset seputar irisan aksi nirkekerasan dengan populisme sayap kanan serta seputar *nonviolent defense*. Ia juga mengembangkan beberapa penelitian di bidang keadilan iklim, manajemen bencana, serta pengungsi (termasuk *internal displacement*).

Dhania Salsha Handiani adalah lulusan Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI), Universitas Gadjah Mada. Ia bekerja sebagai manajer dan peneliti Damai Pangkal Damai, serta asisten peneliti di INKLUSI Fisipol UGM. Ia menulis skripsi mengenai keunggulan strategi nirkekerasan dalam gerakan kemerdekaan Timor Timur, yang kemudian ia presentasikan bersama Dr. Diah Kusumaningrum selaku pembimbingnya di International Studies Association (ISA) Conference 2022 di Nashville, Amerika Serikat.

Diah Kusumaningrum adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI) dan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), Universitas Gadjah Mada. Di antara kelas yang ia ampu adalah Pengantar Studi Perdamaian, Studi Nirkekerasan, dan Filsafat Resolusi Konflik. Bersama Ayu Diasti Rahmawati, ia menginisiasi program Damai Pangkal Damai pada tahun 2016. Ia memperoleh gelar MA dari University of Bradford, di mana ia menulis disertasi mengenai penggunaan aksi nirkekerasan dalam konflik-konflik vertikal, horizontal, dan sistemik. Untuk disertasinya doktoralnya, ia menulis mengenai rekonsiliasi sehari-hari di Maluku, dan memperoleh gelar dari Rutgers University. Ia menerima Global South Feminist Scholar Award dari International Studies Association (2022-2023).

Kai Peter Stabell adalah pendiri dan pemimpin Center for Conversational Conflict Resolution, sebuah badan penasehat dan pelatihan resolusi konflik bagi organisasi nirlaba, bisnis, dan LSM. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Senior Project Manager di Michigan Medicine's Quality Department, dan memiliki pengalaman bekerja di United Nations Development Programme. Ia mendapatkan gelar MA dari Department of Peace Studies, University of Bradford dan telah berkunjung ke Palestina.

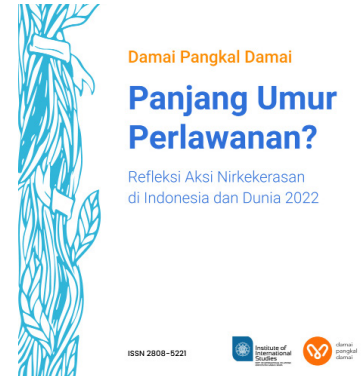
Produk DPD



**Infografis Mingguan
198 Metode
Aksi Nirkekerasan**



**Kaleidoskop Bulanan
Perlawanan Nirkekerasan
di Indonesia dan Dunia**



**Refleksi Tahunan
Perlawanan Nirkekerasan
di Indonesia dan Dunia**



**Podcast
Pekerja Nirkekerasan
Sehari-hari**



**Buku Saku
Aktivisme Nirkekerasan**
ugm.id/AktivismeNirkekerasan



**Buku Saku
Jurnalisme Nirkekerasan**
ugm.id/JurnalismeNirkekerasan

DPD adalah penerima dana hibah penelitian DIHI UGM 2016, dana hibah penelitian internasional FISIPOL UGM 2018, Peace Research Grant dari International Peace Research Association Foundation 2020, serta dana hibah hilirisasi penelitian FISIPOL UGM 2021.



damai
pangkal
damai

